

VOL. 1 NO. 2, APRIL 2025



Jurnal
jalandamai
KAJIAN TERORISME DAN KONTRA NARASI

TERORISME PASCA 11

SUSUNAN REDAKSI JURNAL JALAN DAMAI

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

Pemimpin Umum

Hendro Wicaksono, M.Krim.

Wakil Pemimpin Umum

Rizky Adhianhar, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Abd. Malik, M.A.

Redaktur Ahli (Reviewer)

Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

Prof. Dr. Suaib Tahir, Lc., M.A.

Penyunting

Abd. Malik, M.A.

Haris Fatwa Dinal Maula, M.A.

Redaktur

Agus Sulaiman, S.H

Noor Irawan, S.E.

Reza Maulana Omar, S.Kom.

Farabi Ferdiansah, M.A.

Tim Kajian

Budi Hartawan, M.Hum.

Haris Fatwa Dinal Maula, M.A.

Indra Awal Priyanto, M.Sc.

Vania Nabilla Aditiarini, S.Sos.

Desain/Layout

Daniel Saroha, S.Ds.

Nadine Christy, S.I.Kom.

Ahmad Baihaqi Valiansyah, S.I.Kom.

Muhammad Qowiyul Amin, S.Ds.

Pusat Media Damai

Komplek Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Jl. Anyar, Desa Tangkil, Bogor, Jawa Barat 16180

Jurnal Jalan Damai, diterbitkan oleh Pusat Media Damai (PMD) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai media kajian strategis dalam meningkatkan penanggulangan terorisme dan menyajikan pembaruan narasi terkini dengan memberikan pencerahan melalui kontra-narasi serta narasi alternatif. Kami mengundang Anda untuk berkontribusi melalui tulisan yang dapat dikirimkan ke email: redaksi.jalandamai@gmail.com.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

- Abd Malik, MA* 4 TERORISME PASCA JAMAAH ISLAMIYAH:
DINAMIKA DAN TANTANGAN

PETA NARASI

- Indra A. Priyanto, Budi Hartawan,
Vania Nabilla, Haris Fatwa* 5 INDONESIA DAMAI TANPA JAMAAH ISLAMIYAH?

KAJIAN

- Farabi Ferdiansah* 9 POLA KOMUNIKASI JAMAAH ISLAMIYAH: ANALISA
STRATEGI DAN ADAPTASI PASCA PEMBUBARAN

- Abd. Malik* 17 FRAGMENTASI SEL JARINGAN TERORISME DI
INDONESIA

- Nurrochman* 23 PERUBAHAN PETA ANCAMAN IDEOLOGI
TRANSNASIONAL PASCA PEMBUBARAN JAMAAH
ISLAMIYYAH

- Tsabita Afifah Khoirunnisa &
Sapto Priyanto* 27 *TRANSITIONAL JUSTICE* UNTUK MANTAN ANGGOTA
TERORIS

- Haris Fatwa* 33 MENGUJI RETORIKA MANIS “DAKWAH SEBELUM JIHAD”

- Wasisto Raharjo Jati* 38 PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM REINTEGRASI
SOSIAL DAN IDEOLOGIS MANTAN NARAPIDANA
TERORISME WANITA DALAM MASYARAKAT

- Muhammad Reza Fadil* 42 PENAFSIRAN EKSTREM PELAKU BOM MASJID

NARASI

- Desi Ratriyanti* 46 MEMBACA ANATOMI SEMPALAN JI; ANTARA GERAKAN
TARBIYAH DAN AKSI AMALIYAH

- Siti Nurul Hidayah* 48 DAULAH ISLAMIYAH; REINKARNASI TERORISME PASCA
BUBARNYA JI

WAWANCARA

- Abu Fida* 50 PEMBUBARAN JI : AKHIR PERJALANAN ATAU STRATEGI
BARU?

E D I T O R I A L

TERORISME PASCA JAMAAH ISLAMIYAH: DINAMIKA DAN TANTANGAN

Berita mengejutkan datang dari 16 tokoh senior Jamaah Islamiyah (JI) yang pada 30 Juni 2024 secara resmi mengumumkan pembubaran organisasi tersebut. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah gerakan radikal terorisme di Indonesia. JI, yang pernah menjadi salah satu pioner organisasi teroris paling disegani sejak era Orde Baru hingga pasca-reformasi, kini menandai akhir perjalanan resminya.

Sebagai organisasi yang melahirkan banyak tokoh radikal dan menorehkan aksi teror mematikan, seperti Bom Bali 2002, kehadiran JI telah membawa perubahan besar dalam cara negara menghadapi ancaman terorisme. Bom Bali menjadi momen krusial yang mendorong perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah memperkuat regulasi, membentuk institusi khusus, optimalisasi penegakan hukum, hingga program deradikalisasi untuk menekan ruang gerak kelompok-kelompok radikal.

Deklarasi pembubaran JI merupakan salah satu buah dari upaya panjang tersebut. Namun, apakah ini berarti akhir dari sejarah teror di Indonesia? Jawabannya terlalu dini untuk disimpulkan.

Pembubaran sebuah organisasi tidak serta-merta mematikan ideologi dan cita-cita yang telah tertanam kuat dalam diri anggotanya. JI bukan sekadar struktur organisasi; ia adalah wadah ideologis yang telah memengaruhi banyak individu dan menciptakan jaringan luas. Dengan deklarasi ini, muncul pertanyaan besar: apakah pembubaran ini benar-benar menjadi pemandu bagi anggotanya untuk meninggalkan ideologi radikal, atau justru menimbulkan perpecahan yang melahirkan sel-sel baru yang lebih ekstrem?

Terorisme di Indonesia juga telah mengalami perkembangan yang kompleks. JI bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam peta terorisme. Seiring waktu, banyak kelompok lain tumbuh dengan pengaruh ideologi transnasional yang menjangkau lintas negara. Kehadiran ISIS, misalnya, menjadi tantangan baru dengan cara rekrutmen yang canggih melalui media sosial dan kemampuan memobilisasi simpatisan di berbagai belahan dunia.

Dinamika ini menunjukkan bahwa pembubaran JI adalah sebuah kesuksesan yang patut diapresiasi, terutama sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam program deradikalisasi. Namun, ini tidak berarti ancaman terorisme berakhir. Tantangan yang dihadapi justru semakin kompleks. Upaya penanggulangan kini harus lebih komprehensif, mencakup pencegahan ideologi radikal melalui pendidikan, pengawasan lebih ketat terhadap jaringan yang tersisa, serta penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting. Terorisme bukan sekadar isu keamanan, tetapi juga persoalan sosial dan ideologis yang membutuhkan pendekatan inklusif. Membangun kesadaran kolektif untuk melawan radikalisme adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

Deklarasi pembubaran JI adalah langkah besar dalam sejarah penanggulangan terorisme di Indonesia. Namun, ancaman terorisme tidak akan hilang begitu saja. Kerja keras untuk menguatkan ketahanan nasional terhadap ideologi radikal harus terus dilakukan, mengingat sejarah telah membuktikan bahwa fragmentasi organisasi tidak selalu menjadi akhir, melainkan awal dari tantangan baru.

Abd Malik, MA

P E T A N A R A S I

INDONESIA DAMAI TANPA JAMAAH ISLAMIYAH?: ANALISIS ANCAMAN DAN PETA NARASI PASCA RUNTUHNYA JI

Indra Awal Priyanto, M.Sc., Budi Hartawan, M.Hum., Vania Nabilla, S.Sos., Haris Fatwa, M.A.



Pendahuluan

Pada 30 Juni 2024, jaringan teroris 'jihadis-salafi' paling berpengaruh di Indonesia Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri secara resmi dan menyatakan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran JI ditandai dengan deklarasi oleh sejumlah tokoh senior JI yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/6/2024). Melalui deklarasi tersebut, perjalanan organisatoris JI yang dimulai pada 1 Januari 1993 akhirnya berakhir (Kompas, 2024). Bubarnya JI ini menyiratkan keberhasilan program deradikalisasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 dengan pendekatan kemanusiaan dan budaya.

Namun demikian, dalam dunia terorisme, kekosongan kepemimpinan atau pembubaran sebuah kelompok tidak serta merta menghilangkan ancaman. Sejarah menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ekstremis sering kali mampu beradaptasi, bertransformasi, dan berfragmentasi membentuk entitas baru yang lebih sulit dilacak dan diidentifikasi.

Temuan Faktual Narasi di Media

Bubarnya JI tidak bisa serta merta dipandang sebagai hilangnya ancaman radikal terorisme di Indonesia. Laporan yang muncul pasca pembubaran JI justru menunjukkan adanya potensi ancaman baru. Sidney Jones (2024) selaku Senior Advisor Institute for

Policy Analysis of Conflict dalam laporannya berjudul "Is This The End of Jemaah Islamiyah" mengatakan, kewaspadaan tetap diperlukan sekalipun pembubaran JI sudah dinyatakan secara tegas. Laporan ini menunjukkan masih adanya rasa pesimistis yang muncul meski JI sudah dinyatakan bubar. Temuan narasi yang muncul disepertaran pembubaran JI pun menunjukkan masih besarnya ancaman radikal terorisme di Indonesia. Beberapa catatan yang menonjol adalah:

1. Narasi Jihad Yang Terus Berkumandang.

Di internal JI sendiri terdapat dikotomi, yaitu kelompok yang meng-endorse kekerasan, dan kelompok yang tidak mendukung kekerasan. Tetapi persamaan dari kedua sub-kelompok tersebut adalah keduanya meletakkan doktrin "jihad" sebagai motor utama dakwah di Indonesia. Jihad yang dimaksud berhaluan seputar merubah sistem pemerintahan. Narasi ini turut dibawa oleh kelompok radikal lama, seperti HTI, FPI, dan yang masih aktif seperti JAD dan Khilafatul Muslimin.

2. Swa-Radikalisasi Menyasar Generasi Muda.

Pada Agustus 2024, Densus 88 juga menangkap seorang pemuda berinisial HOK (19) yang merencanakan teror bom bunuh diri. Menyadur Antara News (2024), HOK terafiliasi jaringan teror Daulah Islamiyah berideologi ekstrem untuk menerapkan "syariat Tuhan" di Indonesia. Obsesi serupa yang dimiliki Jamaah Islamiyah.

Berdekatan dengan bubarnya Jamaah Islamiyah, Densus 88 menangkap penjual bubuk yang terduga teroris jaringan ISIS di Karawang, Jawa Barat (15/6/2024). Terduga teroris berinisial AAR itu ditangkap dengan sejumlah bahan peledak miliknya yang digunakan untuk melakukan aksi teror (Kompas, 2024).

Memetakan Pola Narasi

Narasi dan peristiwa yang berkembang di jagad maya disepertaran pembubaran JI menunjukkan pola yang konsisten bahwa

narasi propaganda dari kelompok radikal masih terus bersirkulasi. Narasi-narasi itu dirancang untuk membangun opini publik, memengaruhi persepsi, dan memobilisasi dukungan. Narasi-narasi yang diusung berkuat pada empat topik di bawah ini:

1. **Urgensi Jihad:** Narasi yang dulunya berfokus pada jihad fisik dan penegakan syariat Islam melalui kekerasan kini beralih kepada berbagai bentuk lain yang tidak kalah berbahaya (Hwang, 2019). Narasi *playing victim*, misalnya, menggambarkan umat Islam sebagai korban penindasan global, memanfaatkan isu-isu seperti konflik Palestina-Israel dan intervensi militer Barat di negara-negara Muslim. Hal ini menciptakan rasa solidaritas di kalangan umat Islam yang merasa tertindas dan mendorong mereka untuk terlibat dalam aksi radikal.

2. **Formalisasi Politik "Khilafah":** Sistem khilafah selalu menjadi tema utama di balik propaganda kelompok radikal terorisme di media sosial sejak awal mereka menginfiltrasi Tanah Air. Propaganda sistem negara Islam *vis a vis* sistem demokrasi terus menerus diulang. Topik 'khilafah' akan menjadi bahasan yang *timeless* selama kelompok radikal terorisme masih bergerak di Nusantara. Besar kemungkinan anggota-anggota eks JI yang belum menerima NKRI akan mendompleng wacana ini mengingat basis ideologi mereka sama, yaitu formalisasi syariat agama di Indonesia seperti yang tertera pada Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (Pavlova, 2007).

Propaganda ini adalah yang paling mudah dibandingkan diseminasi pesan jihad yang lain. Imajinasi 'setan vs malaikat' ini paling mudah masuk dalam benak audiens terutama mereka yang masih dalam proses pencarian identitas seperti Millennial, Gen Z, dan Gen Alpha.

3. **Moderasi adalah Proyek Barat:** Gagasan *Islam Wasathiyah* atau moderasi beragama lahir dari rahim organisasi Nahdlatul

Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berhaluan ahlussunnah wal jamaah Nusantara. Moderasi beragama dinilai merupakan salah satu alternatif untuk mengkompromikan ajaran Islam yang dinamis dengan nilai-nilai lokalitas Nusantara. Namun, gagasan ini digugat oleh kelompok radikal terorisme bahwa konsep moderasi beragama merupakan konsep Barat dengan tujuan untuk melemahkan ajaran Islam.

- 4. Islamic Brotherhood:** Terorisme tak pernah lepas dari perkembangan politik internasional. Selama konflik di berbagai belahan dunia yang sering kali dilekatkan sebagai “konflik agama” terus terjadi, kelompok radikal teroris masih akan muncul kembali. Konflik Israel-Palestina yang pecah 7 Oktober 2023 menjadi kendaraan bagi para kelompok radikal terorisme menyebarkan narasi propaganda. Hingga saat ini, mereka banyak mengeluarkan pernyataan bahwa negara-negara Islam adalah penghianat karena negara-negara Islam hanya mengecam namun tidak memberikan bantuan militer kepada Palestina.

Melalui celah ini, mereka lalu mengkampanyekan narasi umat Islam harus di bawah kepemimpinan ‘khilafah’ agar Palestina merdeka. Propaganda ini dapat memicu peningkatan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) serta perlawanan terhadap pemerintah Indonesia karena framing bahwa negara ini adalah negara demokrasi sekuler buatan Barat yang justru berniat melemahkan Islam.

Implikasi Sosial dan Politik

Narasi dan peristiwa yang berkembang disepertikan pembubaran JI memiliki implikasi yang luas, baik dalam konteks sosial maupun politik. Di tingkat sosial, narasi-narasi di atas berisiko memperparah polarisasi di masyarakat. Pemanfaatan isu-isu soal kesejahteraan umat Islam, ‘khilafah vs sekularisme’, konflik Timur Tengah, menjadi amunisi untuk memanipulasi public concern utamanya umat Islam sebagai

komunitas terbesar di Indonesia.

Secara politik, narasi yang muncul dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya dinamika global yang terkait dengan ancaman radikal terorisme dunia seperti masih adanya ISIS dan kelompok radikal lain di berbagai belahan dunia. Empat pilar berbangsa dan bernegara di Indonesia yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika akan selalu diuji oleh manuver kelompok ekstremis dan radikal teroris yang tersembunyi di bawah tanah.

Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi penting guna memperkuat ketahanan kita terhadap propaganda radikal pasca bubarnya JI:

- 1. Kerja Sama Komunitas Lintas Agama Merawat Daerah dari Konflik.** Mengingat konflik lintas agama merupakan kayu bakar bagi bangkitnya gerakan-gerakan teror, peran gerakan lintas agama daerah menjadi krusial untuk merawat keberagaman di wilayahnya dan mengeliminir potensi gesekan antar golongan.
- 2. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Menangkal Propaganda Radikal Terorisme dalam Ruang Digital.** Akselerasi penggunaan teknologi mutakhir oleh kelompok radikal menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku media sosial sangat mendesak. Dengan menggandeng platform arus utama seperti Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), X, TikTok, Telegram, YouTube, konten radikal terorisme dapat diidentifikasi dan dihapus lebih cepat. Kerjasama ini juga bisa diwujudkan dengan menciptakan algoritma deteksi dini untuk narasi-narasi berbahaya yang juga bisa menyebar melalui rekayasa kecerdasan buatan dan *echo-chamber*.
- 3. Pengembangan Program Deradikalisasi**

untuk Eks Ji yang Terlibat dalam “Soft Jihad”. Banyak anggota Ji yang, meskipun menyatakan kembali ke NKRI, masih mempertahankan semangat dakwah yang bisa mengarah ke radikal terorisme terselubung. Program deradikalisasi perlu dikembangkan dengan pendekatan psikososial agar lebih inklusif dan mampu menggali keyakinan ideologis yang tersisa.

4. **Pengawasan dan Intervensi pada Narasi “Khilafah” dalam Acara-acara Publik.** Seiring dengan upaya kelompok-kelompok ekstremis menyusupkan ideologi khilafah di ruang-ruang publik, penting bagi aparat untuk terus melakukan pengawasan ketat pada acara-acara besar bertema agama. Melalui koordinasi dengan penyelenggara acara dan komunitas setempat, narasi yang terindikasi radikal dapat segera diidentifikasi dan diintervensi.
5. **Pengawasan terhadap Aset-aset Jamaah Islamiyah yang Tersebar.** Negara dan stakeholder yang berwenang perlu mengawal poin-poin deklarasi Ji utamanya terkait komitmen penyesuaian kurikulum pesantren terafiliasi Ji dengan kurikulum standar nasional. Pengawasan juga perlu ditujukan kepada yayasan-yayasan Ji yang sebelumnya digunakan sebagai wadah pendanaan aksi radikal teroris serta tempat-tempat yang pernah menjadi locus Ji mengkader para kombatan.

Kesimpulan

Narasi dan peristiwa yang mengikuti pasca pembubaran Ji menunjukkan bahwa propaganda radikal masih ada dan masih dapat digunakan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan jihad yang berorientasi pada kekerasan dan menyebarkan teror. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan berfokus pada edukasi, kontra-narasi, serta penguatan kohesi sosial. Tanggung jawab kolektif ini tidak hanya dalam rangka menjaga stabilitas nasional, tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam

melawan ekstremisme dan radikal terorisme. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, masyarakat dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih komprehensif dan mampu secara mandiri menangkal propaganda radikal terorisme secara efektif.

Referensi

- Elena Pavlova. 2007. From a Counter-Society to a Counter-State Movement: Jemaah Islamiyah According to PUPJI. *Studies in Conflict & Terrorism*, 30(9), 777–800. <https://doi.org/10.1080/10576100701501984>
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2022). *Ji UNDER PARA WIJAYANTO*. In *JEMAAH ISLAMIYAH’S MILITARY TRAINING PROGRAMS* (pp. 1–2). Institute for Policy Analysis of Conflict. <http://www.jstor.org/stable/resrep47374.4>
- Julie Chernov Hwang. 2019. Dakwah before Jihad: Understanding the Behaviour of Jemaah Islamiyah. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 41(1), 14–34. <https://muse.jhu.edu/article/722695>.
- Sidney Jones. 2011. Indonesian Terrorism in a Global Context. *International Crisis Group*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesian-terrorismglobal-context>

Situs

- <https://www.antaranews.com/berita/4239087/polri-ungkap-kronologi-tersangkaterorisme-di-batu-terpapar-propaganda>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240226125838-12-1067355/polisi-sebutacara-metamorfoshow-di-tmii-tak-bawa-atribut-hti>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/16/101500865/densus-88-tangkappenjual-bubur-terduga-teroris-di-karawang>
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/19/kisah-di-balik-pembubaran-dirijamaah-islamiyah-1>

K A J I A N

POLA KOMUNIKASI JAMAAH ISLAMIYAH: ANALISA STRATEGI DAN ADAPTASI PASCA PEMBUBARAN

Farabi Ferdiansah

Direktur Eksekutif Digital Resilience Indonesia

Pendahuluan

Jamaah Islamiyah atau yang disingkat JI adalah organisasi terlarang yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Sebagai organisasi yang sangat terorganisir dan mapan, JI memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam menjalankan organisasinya, JI memiliki Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI) untuk dijadikan landasan amaliyah. PUPJI ini menjadi medium komunikasi untuk menjaga ideologi dan jalan perjuangan JI. Namun, setelah maraknya penangkapan, JI bertransformasi menjadi organisasi yang modern, militan dan strategis di bawah Para Wijayanto. Beberapa kebijakan Para Wijayanto mampu membawa JI memiliki kekuatan-kekuatan taktis yang tersembunyi. Salah satu contohnya adalah, revitalisasi PUPJI menjadi tuntunan Tas Tos.

Tas Tos menjadi strategi komunikasi risiko JI dalam memitigasi anggotanya agar tidak tertangkap aparat keamanan. Inovasi ini menyajikan pedoman operasional keamanan, mulai dari metode komunikasi, pemantauan intelijen dan kontra intelijen. Melalui pendekatan komunikasi yang terorganisir, JI berhasil menjaga kesinambungan ideologi dan memperkuat jaringan antar anggotanya.

Tulisan ini membahas secara mendalam mengenai pola komunikasi yang diterapkan oleh JI. Hubungan antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauan yang fokus kepada individu yang terlibat di dalam mencapai tujuan organisasi. Ilmu komunikasi mendefinisikan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, strategi yang diterapkan, media yang digunakan hingga bagaimana proses interaksi komunikasinya dalam upaya menyebarkan pesan, ideologi,

eksistensi serta tujuan organisasinya (Effendy & Surjaman, 1990).

Oleh karena itu, penting untuk kita telaah pola komunikasi yang dilakukan oleh internal organisasi. Hal ini dilakukan untuk menelaah lebih jauh pengaruh organisasi terhadap individu yang terlibat di dalamnya dan mengidentifikasi potensi ancaman serta mencari cara untuk memutuskan jaringan mereka secara efektif.

Sekilas Tentang Jamaah Islamiyah

Jamaah Islamiyah didirikan pada 1 Januari 1993 di Malaysia oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, warga negara Indonesia keturunan Arab Yaman yang hijrah ke Malaysia untuk menghindari represi militer oleh orde baru. JI disebut sebagai organisasi militan pertama yang berisikan alumni pelatihan kamp militer di Afghanistan (periode 1980-1990-an) di Asia Tenggara (Wibisono, n.d.). Seiring berjalannya waktu, JI memperluas jaringan organisasi dan pengaruhnya di Asia Tenggara, terutama di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia. Organisasi ini dikenal dengan doktrinnya yang mengutamakan syariat Islam yang kaffah dan menggunakan jalan jihad sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuannya.

Di Indonesia, JI dinilai bertanggung jawab atas peristiwa rententan serangan bom di sejumlah gereja, termasuk di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto, dan Mataram pada malam Natal tahun 2000. JI juga dianggap menjadi otak serangan Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Peristiwa tersebut memakan 202 korban jiwa yang berasal dari 22 negara dan dikenal sebagai sejarah teror terburuk di Indonesia. Atas rententan peristiwa

teror tersebut, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memasukkan JI sebagai kelompok teroris dan menjadi bagian jaringan Al Qaeda pada 27 Oktober 2002 (Saptohutomo, 2024).

Pasca rentetan teror itulah, polisi mulai intensif melakukan penyelidikan terhadap gerak anggota JI. Tahun 2002 mulai marak penangkapan pada tokoh-tokoh JI seperti Abu Bakar Ba'asyir, Mukhlas, Koordinator JI wilayah Asia Tenggara, Fathur Rohman Al-Ghozy, dan 10 anggota JI yang terlibat perampasan (fai) di Medan dan Pekanbaru (Niam, 2021). Pasca penangkapan Abu Bakar Ba'asyir yang diyakini sebagai Amir ke-2 setelah Abdullah Sungkar, tongkat kepemimpinan JI beralih ke tangan Abu Abu Rusydan (2003-2004), Adung alias Sunarto (2004-2005) Zarkasih alias Zahroni alias Mbah (2005 -2007), dan Para Wijayanto alias Aji Pangestu alias Abu Askari alias Ahmad Arief alias Ahmad Fauzi Utomo (2008-2019).

Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah

Selain memiliki struktur hierarki, JI juga memiliki panduan yang menjadi acuan dalam pergerakannya, yang disebut Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI). PUPJI dikeluarkan oleh pengurus pusat atau dikenal sebagai Qiyadah Markaziyah tahun 1996. Pedoman ini memuat struktur organisasi, landasan prinsip agama, pergerakan organisasi, rekrutmen anggota dan strategi operasional JI (Pavlova, 2007). PUPJI kunci utama dalam strategi mencapai tujuan bersama, yaitu mendirikan negara Islam di Asia Tenggara (Sariburaja, 2013).

PUPJI setidaknya mengidentifikasi 10 prinsip dasar organisasi untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Berikut prinsip-prinsip PUPJI yang dirangkum dalam buku karya Al-jama'ah al-islamiyyah karya Kennimrod Sariburaja (Tim Jamaah Islamiyah, 1993 dalam Sariburaja, 2013, h. 28).

1. Tujuan kami adalah mencari keridhoan Allah dengan jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah.
2. Aqidah kami berlandaskan pada akidah ahlussunnah wal jamaah ala minhajus salafus salih (akidah orang-orang yang berpegang pada sunnah dan jalan para pendahulu yang saleh)
3. Pemahaman kita adalah Islam yang bersifat

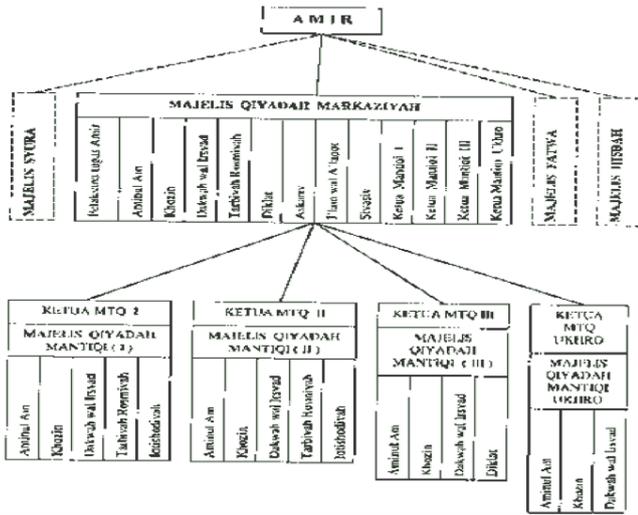
komprehensif, berlandaskan pemahaman para orang-orang soleh (salafusshalih).

4. Target perjuangan kita adalah pengabdian manusia kepada Allah dengan menegakkan khilafah di muka bumi.
5. Jalan kita adalah iman (keimanan), hijrah dan jihad fi sabilillah
6. Ketentuan kami adalah:
 - Ilmu dan taqwa
 - Yakin dan tawakal (berserah diri kepada Allah SWT)
 - Bersyukur dan sabar
 - Meninggalkan keduniawian (zuhud) dan mengutamakan akhirat
 - Cinta berjihad di jalan Allah
 - Cinta syahid
7. Cinta kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman
8. Musuh kita adalah setan di antara jin dan setan dari antara manusia.
9. Ikatan jamaah kita berdasarkan tujuan, iman, keyakinan dan pemahaman terhadap agama.
10. Praktik keislaman kita secara murni dan total, dimulai dari jamaah diikuti oleh negara (daulah) dan khilafah.

Dari 10 prinsip inilah, terungkap langkah sistematis JI dalam membangun negara Islam yang dimulai dengan konsolidasi kekuatan kelompok, pergerakan dakwah dan jihad demi terwujudnya daulah keislaman dan kekhalifahan. Pedoman inilah yang menjadi pondasi anggota JI dalam melaksanakan amaliahnya.

Struktur Jamaah Islamiyah

JI merupakan sebuah organisasi yang cukup terorganisir dibanding organisasi jihad lainnya di Asia Tenggara. Dalam laporan International Crisis Group di tahun 2009, diungkapkan JI memiliki struktur hierarki dengan jaringan sel di Singapura, Filipina, Malaysia, Australia dan Indonesia. (Indonesia: Pemboman Hotel, 2009). Dalam struktur organisasinya, JI dipimpin oleh seorang Amir, yang berkedudukan sebagai pengurus pimpinan pusat atau dikenal dengan Majelis Qiyadah Markaziyah, yang mengatur administrasi keuangan, Majelis Fatwa, Majelis Syura, Majelis Hisbah, dakwah sosial, bidang pendidikan, akademi militer, aksi kemiliteran, kehumasan dan politik (Abas, 2005 dalam Wibisono, n.d.).



Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah (Wibisono, n.d.)

Selain Amir atau pemimpin tertinggi, JI mengatur pembagian wilayah secara territorial, yang disebut Mantiqi atau gerak dakwah yang tunduk pada pimpinan pusat dalam menjalankan aksinya. Sejak 1997, JI memiliki empat mantiqi (Niam, 2021), yakni:

1. Mantiqi 1, atau Mantiqi Ula yang berpusat di Johor, Malaysia. Wilayah gerak dakwahnya meliputi wilayah Malaysia Barat dan Singapura. Pusat komando mantiqi 1 berada di Johor. Diyakini mantiqi ini berperan untuk menyediakan dana operasi JI.
2. Mantiqi 2, atau Mantiqi Tsani, yang berpusat di Solo. Wilayah gerak dakwahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan NTT. Disinyalir Mantiqi 2 ini merupakan sasaran jihad.
3. Mantiqi 3, atau Mantiqi Tsalis, yang berpusat di Sabah, Malaysia. Wilayah gerak dakwahnya meliputi Sabah, Kalimantan Timur, Palu, Poso dan Filipina Selatan. Mantiqi ini berperan melaksanakan pelatihan kemiliteran.
4. Mantiqi 4, atau Mantiqi Ukhro, yang disinyalir memiliki cakupan wilayah di Australia. Mantiqi ini juga dikenal sebagai mantiqi persiapan dan berperan untuk mengumpulkan dana.

Di bawah stuktur Mantiqi, terdapat Wakalah, yang berarti perwakilan. Masing masing mantiqi dibagi menjadi empat wakalah dan wakalah tersebut dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok atau fi'ah (Asnawi & Fachri, 2017). Dalam buku Membongkar Jamaah Islamiyah

karya Nasir Abas, diungkapkan dibawah Wakalah terdapat struktural yang lebih kecil, yakni Saroyah yang merupakan nama bagi sebuah kesatuan seperti Batalion yang terdiri dari 3 Katibah. Dalam sturuktur Katibah, terdiri atas tiga Qirdas. Qirdas merupakan sebuah nama untuk sebuah kesatuan seperti Pleton, yang terdiri atas tiga sel sel kecil yang disebut Fiah, yang diyakini terdiri atas enam hingga 10 anggota. Kemudian, dibawah Fiah terdapat nama kesatuan atau kelompok yang lebih kecil dari sebuah Fiah. (Abas, 2005 h, 70 dalam Wibisono, n.d.)

Selain itu, Mabes Polri mengungkap struktur JI yang diintisarikan dari hasil penyelidikan pada Jumat, 9 September 2010 di hadapan para media (Prawira, 2025).

Transformasi Jamaah Islamiyah

Para Wijayanto, sebagai pimpinan terakhir, membawa perubahan besar di tubuh JI. Maraknya penangkapan dan adanya anggota yang melepaskan diri lalu membuat entitas baru, membuat Para Wijayanto merestrukturisasi JI, memodifikasi PUPJI dengan konsep doktrin yang lebih modern, dinamakan tuntunan Total Amniyyah Sistem and Total Solution (Tas ToS), yang mencakup panduan keamanan anggota JI untuk menghindari kejaran aparat keamanan. Panduan Tas Tos dilakukan dengan strategi Tamkin, yakni langkah untuk meraih tamkin siyasah atau kemenangan politik untuk tegaknya syariat Islam (Setyawan, 2023). BNPT menilai strategi tamkin merupakan kamufase JI dalam menyembunyikan identitasnya. Hal ini dilakukan dengan menguasai wilayah, dan menyusupkan anggota ke semua lini dengan masuk ke dalam institusi negara maupun masyarakat (Pramono, 2021). Misalnya, penangkapan Farid Amad Okbah sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Ahmad Zain An Najah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anung Al-Hamat selaku Dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ketiga sosok tersebut merupakan petinggi JI yang memiliki posisi strategis di lingkaran Para Wijayanto (Pramono, 2021).

Di masa kepemimpinannya Para Wijayanto, struktur JI dibuat lebih teroganisir dan rapi. JI melakukan kaderisasi berlapis, penguatan kapasitas anggota serta penerapan komunikasi terenskripsi, untuk melakukan komunikasi tanpa terdeteksi (Maulana, 2021). Para Wijayanto



Mengungkap Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah

mengubah gerakan Ji dari kekerasan dengan dakwah, pendidikan dan penguatan ekonomi untuk mewujudkan tujuan utamanya, yakni pendirian negara Islam. Di bawah komandonya, Ji mengencarkan pembangunan kekuatan dengan mendirikan akademi pengkaderan dan pendidikan yang melibatkan instansi pendidikan jaringan Ji di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur (Putri & Dzulfaroh, 2024). Setidaknya, polisi mencatat ada sekitar 6.000 anggota aktif Ji di Indonesia (Batubara, 2020) dan puluhan pondok pesantren terafiliasi Ji.

Dari siasat inilah Ji melakukan penguatan jaringan, pengkaderan, pengembangan anggota untuk menyusun kekuatan baru, mengumpulkan potensi muda yang cerdas, mahir berbahasa arab dan tangguh untuk disiapkan berjuang ke daerah konflik di Timur Tengah. Tercatat, Ji telah mengirim tujuh angkatan mudanya ke daerah konflik, di Suriah sejak 2013 hingga 2018. Mereka terdiri anggota muda yang memiliki keahlian management, IT, medis dan sebagainya (Widadio, 2021). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh National Security Australia, dilaporkan Ji telah melatih 96 anggota militan mudanya yang dilatih di 12 kamp pelatihan di Pulau Jawa, dan lebih dari 60 anggotanya telah berkangkat ke Suriah (Australian National Security, n.d.). Tentunya diaspora ini dilakukan untuk menjalin hubungan dengan organisasi organisasi Islam garis keras di luar negeri, yang nantinya akan membangun relasi internasional untuk membangun negara Islam.

Komunikasi Organisasi Jamaah Islamiyah

Sepanjang sepak terjangnya selama 31 tahun (1993-2024), Ji dibangun dengan bentuk hierarkis-birokratis (Maulana, 2021), yang menempatkan Amir, sebagai pucuk pimpinan tertinggi untuk memberikan perintah, arahan dan mengatur operasi. Namun, ditangkapnya para pimpinan dan tokoh Ji tidak menyurutkan perjuangan Ji untuk menegakkan negara Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ji terus bertransformasi, melakukan komunikasi internal dan adaptasi dengan situasi untuk mempertahankan eksistensi organisasi.

Komunikasi organisasi dikendalikan oleh level hierarki dan bagian atau sub-unit sebuah organisasi. Tingkatan hierarkis inilah yang memberikan frekuensi komunikasi di dalam internal organisasi, di mana anggota organisasi yang memiliki tingkatan lebih tinggi memiliki wewenang, atensi lebih besar dibanding anggota yang berada di bawah struktural organisasi (Iasmina et al., 2019). Komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai sistem yang terorganisir dari masing masing individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui tingkatan hierarki dan suatu jenjang kepangkatan (Effendy & Surjaman, 1990, h. 105).

1. Komunikasi Hierarki

Struktur dalam organisasi tidak hanya

penempatan orang pada setiap posisi atau level, namun juga membentuk hirarki komunikasi (Hartanto, 2020). Model hierarki merupakan model dimana pucuk pimpinan tertinggi diletakan pada struktural paling atas, sedangkan tingkat yang lebih rendah berada di posisi bawah secara berurutan. Model komunikasi hierarkis dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dalam memberikan pengaruh kepada kepada anggota, karena memiliki relasi antara satu sama lain, layaknya pimpinan dan bawahan dalam sebuah organisasi (Hartanto, 2020). Dalam struktur hierarki inilah, peran eksistensi organisasi ini dikendalikan dan dikoordinasikan.

Pola komunikasi hierarki yang dilakukan oleh kelompok JI adalah komunikasi dari atas ke bawah (*downward communication*) dan dari bawah ke atas (*upward communication*). Pola komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya ini dikenal dengan dengan pola komunikasi *vertical*, di mana pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan kepada bawahannya. Kemudian, bawahan memberikan laporan atau rencana yang diambil untuk mewujudkan tujuan organisasi. (Effendy & Surjaman, 1990).

Dalam memberikan arahan dan acuan nilai nilai perjuangan JI, PUPJI menjadi kunci penting dalam membentuk ideologi, dan landasan berorganisasi anggota JI. PUPJI menjadi medium komunikasi internal organisasi JI, yang menyelaraskan gerak organisasi dan amaliah struktural dari pimpinan tertinggi hingga ke akar rumput. Jika dianalogikan, PUPJI layaknya Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara Republik Indonesia. Selama nilai nilai Pancasila dipegang teguh dan diinternalisasi oleh masyarakat, maka segala ancaman, gangguan hingga perpecahan akan mudah ditangkal.

2. The Linking Pin Model Theory

The Linking Pin Model Theory atau Teori Peniti Penyambung menjelaskan bagaimana pola komunikasi organisasi berhubungan erat dengan sosok pemimpin, manajer, supervisor, atau penyelia dalam sebuah struktur yang berkaitan dengan struktur lainnya yang lebih tinggi. Teori yang dikembangkan oleh Renis Linkert ini memandang sosok pemimpin atau manajer dalam sebuah kelompok menjadi titik tumpu (*peniti*) yang menjadi penghubung bagi seluruh anggotanya dalam berkomunikasi dengan struktur lainnya dalam sebuah organisasi (Novianti, 2023).

Linkert yang kerap meneliti perilaku manusia dalam pengembangan organisasi ini menekankan pentingnya fungsi komunikasi dan koordinasi dalam berorganisasi. Pendiri dari University of Michigan's Institute for Social Research ini menganggap komunikasi organisasi yang efektif dapat tercipta dengan adanya pola yang saling tumpang tindih dan berhubungan dengan kelompok lain yang kompetitif, "*highly effective work groups linked together in an overlapping pattern by the competitive groups*" (Zentis, 2021). Misalnya, sebagai pimpinan Mantiqi JI, ia menjadi pimpinan dalam kelompok tersebut, namun juga menjadi anggota dari struktural yang lebih tinggi dibawah kepemimpinan Amir JI. Hubungan antar relasi ini diyakini mampu membangun komunikasi organisasi lebih baik.

Oleh karena itu, dari relasi ini dapat dianalisa bagaimana peran pimpinan struktural JI, termasuk ustaz JI di akar rumput. Mereka, sebagai pemimpin dalam strukturalnya, dianggap sebagai figur berpengaruh dalam mengatur, membangun relasi yang lebih luas, untuk menerima dan menyampaikan informasi. Sehingga pandangan atau '*fatwa*' mereka sangat dihargai dalam mengambil keputusan, bernegosiasi ataupun memvalidasi untuk pengembangan organisasi. Maka ketika terjadi dinamika di tubuh JI terkait perbedaan pendapat dalam melaksanakan aksi jihad di Indonesia, ada beberapa tokoh JI memisahkan diri untuk mendirikan organisasi, atau bergabung dengan organisasi lain. Misalnya Abu Bakar Baasyir yang mendirikan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), atau anggota lain yang bergabung dengan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) maupun Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang dianggap lebih mengakomodir nilai-nilai perjuangan jihad yang selama ini diperjuangkan oleh JI.

Selain itu, Para Wijayanto memberikan legitimasi struktur regional untuk bisa memberikan putusan atau kebijakan di regionalnya dalam mengembangkan organisasi tanpa harus melakukan koordinasi horizontal maupun berjenjang hingga ke pusat (Maulana, 2021). Dengan adanya strategi ini, dimungkinkan titik tumpu (*peniti*) dari masing masing divisi bisa menggunakan jalur komunikasi yang aman untuk bisa memutus koordinasi, memutus jaringan agar tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga ketika ada satu divisi atau satu kelompok tertangkap, divisi lainnya tetap masih bisa beroperasi dan kembali melakukan re-strukturisasi.

Bahkan setelah Para Wijayanto ditangkap pada Juni 2019, tokoh-tokoh JI, serta internal divisi lainnya masih melakukan koordinasi dan evaluasi anggotanya secara rutin (Satria, 2023). Para tokoh senior membuat struktur baru yang dinamakan Tim Lajnah Ihtiar Linasbil Amir, yang bertugas mencari pengganti Para Wijayanto, yang diinisiasi oleh 3 tokoh senior JI, Arif Siswanto, Sirojuddin dan Hasan Partono, dengan legitimasi dari tokoh senior JI dan alumni Afghanistan seperti Zarkasih dan Muhaimin Yahya (Satria, 2023).

3. Komunikasi Risiko

Dalam masa kepemimpinan Para Wijayanto, potensi JI kembali dihidupkan dengan merevitalisasi PUPJI yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik, tanpa menghilangkan tujuan utama JI, yakni membentuk negara Islam (Islamic state). Maka muncullah Tas Tos dengan strategi Tamkin. Potensi sel sel tidur dihidupkan dan diorganisir kembali dengan semangat pembaharuan JI. Penulis melihat apa yang dilakukan oleh Para Wijayanto ini sangatlah cerdas dalam mempertahankan eksistensi organisasinya. Tas Tos merupakan bentuk dari strategi komunikasi risiko.

Dalam buku *Improving Risk Communication*, komunikasi risiko adalah suatu interaksi pertukaran informasi antara individu kelompok dan lembaga yang terkait dengan pesan, risiko, kekhawatiran atau reaksi terhadap pesan risiko, risiko hukum, kelembagaan untuk mengelola manajemen risiko (*Improving Risk Communication*, 1989). Komunikasi risiko bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang risiko yang dihadapi, membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi, membangun dialog konstruktif, meningkatkan kewaspadaan, memberikan panduan, tindakan pencegahan dan perlindungan yang tepat terkait risiko yang dihadapi. (Covello, Minamyer & Clayton, 2007)

Dalam hal ini, anggota JI diberikan panduan bagaimana menggunakan komunikasi yang aman, tindakan apa yang harus dilakukan ketika adanya rencana penangkapan, bagaimana cara menunjuk kembali penerus, bagaimana untuk menghilangkan barang-barang hingga cara untuk pindah ke provinsi lain untuk bersembunyi (Satria, 2023). Di bawah konstruksi Para Wijayanto, tuntunan Tas Tos ini cukup efektif dalam melakukan mitigasi tangkapan aparat keamanan. Tercatat, Para Wijayanto menjadi

amir terlama JI dari tahun 2008 hingga 2019, dan JI memiliki aset milyaran rupiah yang berkamufase menjadi lembaga amal, yayasan sosial, perusahaan sawit di Kalimantan dan Sumatera, infiltrasi ke dalam partai, organisasi keagamaan, dan komunitas motor.

Kesimpulan

JI merupakan organisasi terlarang yang sangat terorganisir dan cukup mapan di Indonesia. Sepak terjang JI selama 31 tahun, telah membuat JI memiliki daya tahan yang tangguh, tidak mudah dihilangkan pengaruhnya. Walaupun sempat terjadi dinamika internal JI dan kekosongan kepemimpinan pada periode 2007-2008, JI dengan mudah melakukan reorganisasi dan restrukturisasi. Hal ini karena mereka telah memiliki pola komunikasi, dan hierarki, dan landasan ideologis yang kuat dalam organisasi. Sehingga mereka sudah mengerti kepada siapa mereka harus berkomunikasi, untuk reorganisasi atau menentukan pemimpin selanjutnya.

Dari menganalisa pola komunikasi JI ini, dapat terungkap bagaimana komunikasi organisasi dan sosok pemimpin, kepala divisi atau tokoh kharismatik JI, memiliki peran penting dalam mempengaruhi anggotanya. Hal ini bisa terjadi karena sosok pemimpin memiliki peran dalam hubungan antarpribadi, penyambung informasi dan pengambilan keputusan (Mintzberg, 1973 dalam Putra & Wispandono, 2020). Dalam kaitannya dengan eksistensi JI hingga akhir 2019, dapat diidentifikasi pergerakan anggota JI terhadap dinamika yang terjadi.

1. **Ideolog - Militan:** Kelompok ini akan memegang teguh ideologi dan bentuk hierarki JI. Sosok pemimpin seperti inilah yang akan melakukan restrukturisasi organisasi, mengarahkan kelompoknya untuk tetap sami'na waato'na (patuh) terhadap dinamika yang terjadi di tubuh JI. Potensi inilah yang akan menjadi cikal bakal penerus JI. Sebagai contoh, Zarkasih, Para Wijayanto dan tokoh senior JI lainnya yang terus menjaga eksistensi JI.
2. **Militan - Ideolog:** Kelompok ini merupakan kelompok yang akan mencari wadah (inang), atau membentuk entitas baru untuk mempertahankan keyakinan dan idealismenya. Sosok pemimpin seperti inilah yang akan membawa kelompoknya untuk

membentuk sebuah organisasi baru untuk memperjuangkan nilai-nilai idealismenya. Misalnya sosok Abu Bakar Ba'asyir, yang membentuk JAT, atau anggota lain yang berpindah ke JAT atau berbaiat kepada ISIS.

3. **Militan:** Secara ideologi sosok ini tidak terlalu kuat, namun anggota dengan tipe seperti ini mudah dipengaruhi oleh pimpinannya. Dalam pergerakannya, ia cenderung akan mengikuti arahan ustaz atau pimpinan strukturalnya.
4. **Simpatisan:** Tipe seperti ini tidak memiliki landasan ideologis yang kuat dalam berorganisasi. Kelompok ini cenderung bisa meninggalkan ideologi JI. Hal ini bisa terjadi akibat adanya komunikasi intrapersonal di dalam dirinya, maupun tekanan dari luar, seperti keluarga, aparat penegak hukum ataupun lainnya.

Meskipun JI telah dibubarkan pada Juni 2024, bukan berarti ideologi dan potensi JI telah hilang. Setidaknya, berdasarkan catatan aparat keamanan, pada tahun 2020 terdapat 6.000 anggota aktif JI dan puluhan jaringan pesantren yang terafiliasi dengan JI. Apalagi, dengan terbitnya tuntunan Total Amniyyah Sistem dan Total Solution (Tas Tos) sebagai strategi komunikasi risiko di internal anggota JI, menjadikan alarm, tanda bahaya bagi aparat keamanan untuk terus mewaspadaai gerak gerik anggota JI yang menguasai teknik kontra intelijen untuk menghindari kejaran aparat.

Selain itu, perlunya mendeteksi, tracing dan pengawasan ketat terhadap anggota JI yang sudah hijrah ke Timur Tengah. Dikhawatirkan mereka masih memiliki pengaruh kuat di internal anggota JI dan menjadi penerus JI. Oleh karena itu penting bagi aparat keamanan untuk mengidentifikasi dan memutus jalur komunikasi hierarki dan koordinasi antar simpul-simpul struktural kepemimpinan JI. Khususnya kepada tokoh-tokoh JI, kelompok ideolog dan militant yang memiliki peran strategis dalam menghimpun kekuatan serta merencanakan aksi.

Daftar Pustaka

- Arsalan Putra, F., & Mas Mochammad Wispandono, R. (2022). E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 11 No. 3 November 2022, 403–412.
- Asnawi, A., & Fachri, Y. (2017). Eksistensi International Crisis Group dalam Perkembangan Gerakan Terorisme di Indonesia Studi Kasus: Gerakan Jamaah Islamiyah Tahun 2002-2015 [Journal:eArticle, Universitas Riau]. <https://www.neliti.com/id/publications/201162/>
- Australian national security website. (n.d.). Retrieved 27 January 2025, from <https://www.nationalsecurity.gov.au/>
- Batubara, P. (2020, Desember). Polri sebut 6.000 sel kelompok teroris jamaah islamiyah masih aktif. SINDOnews Nasional. <https://nasional.sindonews.com/read/273022/13/polri-sebut-6000-sel-kelompok-teroris-jamaah-islamiyah-masih-aktif-1608286364>
- Covello, V.T., S. K. Minamyer, and K. Clayton. 2007. Effective Risk and Crisis Communication During Water Security Emergencies: Report of EPA Sponsored Message Mapping Workshops. EPA/600/R-07/027. Washington, D.C.: U.S. Environmental Protection Agency.
- Effendy, O. U., & Surjaman, T. (1990). Ilmu komunikasi teori dan praktek. Remaja Rosdakarya.
- Hartanto, D. (2020). Model hierarki komunikasi organisasi badan reserse dan kriminal kepolisian republik indonesia (Bareskrim polri). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 4(2), 111–120. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v4i2.8480>
- Improving risk communication. (1989). National Academies of Sciences. <https://doi.org/10.17226/1189>
- Group, I. C. (2009). Indonesia: Pemboman hotel. International Crisis Group. <https://www.jstor.org/stable/resrep38292>
- Ismail, N. H., & Ungerer, C. (2009). Jamaah Islamiyah: A renewed struggle? Australian Strategic Policy Institute. <https://www.jstor.org/stable/resrep03930>
- Iasmina, I., Gabriela, P., & Alexandra, V. (2019). Communication management in hierarchical structures. *Banat University of Agricultural Science and Veterinary Medicine, LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE, SERIA I, VOL. XXI (1)*, 33–40. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20193244910>

- Maulana, I. (2021, December 4). Memahami sisi gerakan politik Jemaah Islamiyah. *The Conversation*. <http://theconversation.com/memahami-sisi-gerakan-politik-jemaah-islamiyah-172496>
- Niam, S. (2021). Jejak militansi jamaah islamiyah di indonesia—Halaman 2. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215235852-20-734636/jejak-militansi-jamaah-islamiyah-di-indonesia>
- Novianti, Tri Devi (2023) Pola Komunikasi Internal Karyawan PT. Pangansari Utama Patisserie Melalui Media Komunikasi Slack. Diploma thesis, Universitas Nasional.
- Pavlova, E. (2007). From a counter-society to a counter-state movement: Jemaah Islamiyah according to pupji. *Studies in Conflict & Terrorism*, 30(9), 777–800. <https://doi.org/10.1080/10576100701501984>
- Pramono, S. T. E. (2021, November 27). Jalan tastos tanpa amir. *Tempo*. <https://www.tempo.co/arsip/bagaimana-jamaah-islamiyah-bersalin-wajah-110718>
- Prawira. (2025, January 28). Mengintip struktur jaringan teroris jamaah islamiah. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/24/mengintip-struktur-jaringan-teroris-jamaah-islamiah>
- Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, July 25). 4 tokoh utama jamaah islamiyah, dari berdiri sampai membubarkan diri halaman all. *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/25/100000765/4-tokoh-utama-jamaah-islamiyah-dari-berdiri-sampai-membubarkan-diri>
- Rumengan, I., Koagouw, F. V. I. A., & Kalangi, J. S. (2020). Pola komunikasi dalam menjaga kekompakkan anggota group band royal worship alfa omega manado. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/29668>
- Saptohutomo, A. P. (2024, July 8). Bubarkan diri, eks tokoh jamaah islamiyah diharap tunjukkan komitmen integrasi. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/08/20392441/bubarkan-diri-eks-tokoh-jamaah-islamiyah-diharap-tunjukkan-komitmen>
- Sariburaja, K. (2013). Al-jama'ah al-islamiyyah. Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT) Ministry of Foreign Affairs, Malaysia.
- Satria, alif. (2023). Understanding jemaah islamiyah's organisational resilience (2019-2022). International Center for Counter-Terrorism. <https://icct.nl/publication/understanding-jemaah-islamiyahs-organisational-resilience-2019-2022>
- Setyawan, A. B. (2023, April 6). Kilas Dinamika Jamaah Islamiyah dari Bom Bali hingga "Islah" (2). <https://ruangobrol.id/berita/ro017074755946062699/sekilas-dinamika-jamaah-islamiyah-dari-bom-bali-hingga-islah-2>
- Wibisono, A. N. (n.d.). Radikalisasi Mantiqi I: Kompetisi internal dalam tubuh jamaah islamiyah. Retrieved 26 January 2025, from https://www.academia.edu/2553816/Radikalisasi_Mantiqi_I_Kompetisi_Internal_Dalam_Tubuh_Jamaah_Islamiyah
- Widhiastuti, H. (2013). The effectiveness of communications in hierarchical organizational structure. *International Journal of Social Science and Humanity*, 185–190. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2012.V2.93>
- Widadio, N. A. (2021, January 4). Polri ungkap rekam jejak pemimpin Jamaah Islamiyah, Para Wijayanto. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/polri-ungkap-rekam-jejak-pemimpin-jamaah-islamiyah-para-wijayanto/2097923>
- Zentis, D. N. (2021, March 1). Pioneers in the field of organization development. Institute OD. <https://instituteod.com/pioneers-field-organization-development/>

K A J I A N

FRAGMENTASI SEL JARINGAN TERORISME DI INDONESIA: MEMBACA TANTANGAN PENANGGULANGAN TERORISME PASCA JAMAAH ISLAMIYAH

Abd. Malik

Pemimpin Redaksi Jurnal Jalan Damai BNPT



Pendahuluan

Berita Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri memang tidak terlalu heboh dan menyedot perhatian yang berlebihan. Pada tanggal 30 Juni 2024 bertempat di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat, JI dengan 16 tokoh seniornya resmi mendeklarasikan pembubaran diri. Deklarasi ini terekam dalam video yang tersebar di berbagai jaringan media sosial yang pertama kali diunggah di kanal Youtube Arrahmad_id pada 3 Juli 2024.

Dalam video tersebut, Abu Rusdan, mantan Amir (pemimpin) JI ditemani oleh 15 tokoh senior JI menyatakan dengan tegas : “Kami menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Deklarasi ini seolah mengkahiri kisah perjalanan JI yang sempat menjadi induk dan aktor paling berpengaruh dalam rangkaian aksi terorisme di Indonesia, khususnya pada awal reformasi.

Setelah membubarkan diri JI berjanji tidak

lagi menggunakan jalan kekerasan sebagai metode gerakannya. Mereka juga berkomitmen untuk merubah cara pandang ekstrem dengan mengadopsi pemikiran yang moderat berdasarkan ahlu sunnah wal jamaah dalam menyebarkan ajarannya. Selain itu, JI berjanji akan membentuk tim pengakjian kurikulum dan materi ajar dan bersedia terlibat aktif dalam mengisi kemerdekaan dan memajukan kehidupan berbangsa.

Atas deklarasi ini, banyak pihak yang menyambut baik dan mengapresiasi langkah JI sebagai bentuk ketegasan diri untuk kembali pada NKRI dan manhaj keagamaan yang moderat. Tanggapan juga muncul berupa apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam mempersempit ruang gerak JI dan keberhasilan program deradikalisasi BNPT dalam memoderasi organisasi ini. Namun, tentu banyak yang meragukan ihwal pembubaran ini. Ada asumsi bahwa JI ingin merubah citra diri agar diterima khalayak dan ada pula anggapan bahwa ini strategi baru JI untuk menyelamatkan aset-aset jaringan yang mulai terjepit dengan upaya penegakan hukum yang menyempitkan ruang gerak organisasi ini.

Deklarasi pembubaran ini tentu saja bukan peristiwa yang datang tiba-tiba. Sejak awal terutama setelah matinya Abdullah Sungkar sebagai pemimpin yang karismatik, dinamika internal terkait perbedaan pandangan dan pendekatan gerakan menjadi pemicu kelemahan organisasi ini. Suksesi Baasyir sebagai pemimpin organisasi, konon, banyak mendapatkan resistensi dari kalangan muda yang lebih militan. Perkembangan berikutnya, berdasarkan refleksi kegagalan gerakan hingga upaya penegakan hukum yang masif terhadap anggota JI di berbagai daerah menyebabkan terjadinya riuh dinamika internal dalam JI yang semakin kencang.

Dalam laporan IPAC, *the Re-Emergence of Jamaah Islamiyah* (2017) JI pernah mengadopsi strategi baru dengan menekankan pada pentingnya dakwah dibandingkan jihad, tetapi dengan asa yang tinggi sebagai tujuan jangka panjang untuk mendirikan negara Islam. Sejak

2007, upaya merubah citra dengan label Neo JI mulai muncul. Pendekatan baru ini dimulai dengan fokus rekrutmen anggota muda dan perencanaan ulang struktur organisasi. Tentu saja, resiko perubahan ini memungkinkan munculnya kelompok sempalan yang lebih militan karena perbedaan pandangan di internal JI. Selain itu, ada kegamangan yang tidak mudah diatasi dalam menyeimbangkan gerakan yang lebih terbuka melalui pendirian berbagai lembaga pendidikan dan donasi dengan gerakan tersembunyi melalui sayap kaderisasi dan pelatihan militer.

Dalam memotret dinamika gerakan radikal Islam di Indonesia, fragmentasi sebenarnya bukanlah penanda bahwa gerakan itu mati. Sebagaimana Darul Islam (DI) juga melewati fase fragmentasi internal, perubahan pandangan ideologis (*ideological outlook*) dan metode gerakan. Fragmentasi DI bukan akhir, tetapi menjadi gerbang dari munculnya sebaran gerakan yang bermutasi dalam banyak sel organisasi (Fealy, 2005). Sejak awal, JI memang telah terbelah dalam dua kelompok yang memiliki perbedaan pendekatan. Pertama, kelompok yang memilih pada pendekatan dakwah, penguatan organisasi dan kaderisasi. Kedua, kelompok yang memiliki pendekatan perjuangan fisik melalui aksi kekerasan yang dianggap sebagai jihad.

Apakah teori fragmentasi JI ini bisa dipakai dalam membaca peristiwa pembubaran JI? Apakah dengan ada pembubaran itu mengindikasikan muncul perpecahan internal yang memungkinkan fragmen sel baru yang tidak sepakat dengan pembubaran JI? Bagaimana strategi dan upaya pencegahan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan pembinaan terhadap mantan JI dan mengantisipasi munculnya sel baru JI?

Sejarah JI dan Terorisme di Indonesia

Sejak awal, sebagaimana Fealy (2002) mengatakan bahwa radikalisme Islam di Indonesia bukanlah hal baru. Merupakan kekeliruan teoritis ketika mengatakan radikalisme berbasis Islam sebagai fenomena

baru dengan mematok dari kemunculan beragam aksi teror di era reformasi sebagai penanda awal. Darul Islam (DI) menjadi organisasi atau gerakan yang menandai gerakan radikal berbasis keagamaan di Indonesia. Dari watak, karakter dan ideologi ini, JI banyak mengambil inspirasi. Bahkan, berdirinya JI merupakan proses mutasi sel baru gerakan radikal karena terjadinya fragmentasi di tubuh Darul Islam di bawah kepemimpinan Ajengan Masduki (Solahudin, 2011).

JIlahirsebagaiupayaamelakukanreorganisasi, restrukturisasi dan rekonsolidasi mantan DI dengan visi yang lebih militan dan terorganisir. Nama JI sendiri sebenarnya bukan nama baru. JI digunakan oleh Abu Bakar dan Sungkar ketika masih berada dalam DI sebagai gerakan bawah tanah dalam memobilisir dan merekrut anak-anak muda yang militan yang dikenal dalam gerakan usra, terutama di jaringan kampus. Tahun 1993 sering dirujuk sebagai berdirinya JI, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir mengkonsolidasikan para pengikutnya dengan merumuskan konsep perjuangan dan tujuan JI. Pedoman Utama Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI) disekapati sebagai dokumen penting pendirian dan arah gerakan JI.

Secara umum, warna dan pengaruh ideologis JI tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, ideologi dan doktrin DI dan kedua pengaruh gerakan dan pemikiran dari Timur Tengah khususnya Mesir. Karena itulah, dalam penyusunan prinsip dasar gerakan JI, Sungkar merujuk pada Mitsaq Islami karya Jamaah Islamiyah Mesir dengan menambahkan beberapa tambahan prinsip yang disesuaikan arah gerakan JI (Sholahuddin, 2011).

Menarik apa yang dikatakan oleh Borgu (2005) bahwa sejatinya JI memang murni sebagai gerakan yang menggunakan teror. Untuk dikatakan sebagai gerakan subversif, JI tidak mempunyai modal dan kekuatan yang cukup besar untuk melakukan mobilisasi pasukan. Berbeda dengan karakter DI yang pernah membuat kejutan besar dalam sejarah pemberontakan di Indonesia. DI berhasil membangun fragmen kelompok

militernya di berbagai daerah dengan gerakan pemberontakan seperti Kalimantan Selatan, Jawa Barat, hingga Aceh. Dengan kekuatan ini mereka mengumumkan perang terbuka kepada negara dan aparat negara. Berbeda dengan JI yang meletakkan musuhnya kepada dua hal, non muslim dan Barat.

Namun, hal menarik dari JI dibandingkan dengan DI adalah koneksinya terhadap jaringan jihad global yang terintegrasi dengan Al Qaeda. Adalah Hambali yang menjadi tokoh kunci yang menjembatani hubungan JI dan Al Qaeda sekaligus menjadi perwakilan utama al Qaeda di Asia Tenggara (Gunaratna, 2002). Dukungan logistik, pelatihan militer dan strategi operasional yang lebih canggih menempatkan JI menjadi perwakilan al Qaeda di Asia Tenggara yang menjadikan Kawasan ini sebagai pusat jihad setelah tekanan Amerika di Afganistan yang semakin meningkat pada tahun 2001.

Selama 7 tahun dari pendirian JI meletuslah gerakan aksi pertama yang mengejutkan Indonesia. Serangan yang dikomandoi oleh Encep Nurjaman alias Hambali ini menasar tempat non muslim, yakni 13 gereja di beberapa kota di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Mojokerto, Mataram dan lainnya. Serangan serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan sedikitnya 96 terluka. Tidak bisa dilupakan, tragedi paling tragis dalam sejarah teror di Indonesia, yakni tiga bom yang meledak di Bali pada 12 Oktober 2002 sebagai representasi perang atas Barat. Peristiwa ini menandai perubahan baru dalam memerangi terorisme dengan lahirnya regulasi dan institusi dalam dalam bidang penanggulangan terorisme.

Tidak berhenti di Bali, masih dengan daya ledak yang hampir mirip melanda ibu kota Jakarta dengan sasaran Hotel JW Marriot pada tahun 2003. Pada September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedubes Australia. Selanjutnya, pada tahun 2005, kembali di bulan Oktober JI mengguncang pulau dewata. Pada tahun 2009, simbol perang terhadap Barat khususnya Amerika dilanjutkan dengan meledaknya bom Hotel Ritz Carlton di Kawasan

Kuningan. Rentetan aksi teror ini hanya menyebutkan beberapa kejadian yang menonjol yang melibatkan anggota JI.

Fragmentasi Sel yang Terikat Genealogi dan Ideologi

Gerakan radikal terorisme yang ada saat ini dengan varian dan warna yang beragam tidak lepas dari warisan genetika ideologis dari pendahulunya. Gerakan baru yang muncul hanya turunan dari watak radikalisme yang dulu pernah menggetarkan sejarah Indonesia. Sebagaimana Bruinessen (2002) meyakini bahwa radikalisme Islam di Indonesia yang marak muncul di permukaan pasca runtuhnya Soeharto memiliki akar sejarah panjang yang dari sejarah radikalisme terdahulu terkait perjuangan kemerdekaan, transformasi sosial-politik, dan pengaruh internasional yang kuat. Pasca-Soeharto, jaringan lama seperti Darul Islam dan ideologi baru seperti Salafi menemukan momentum untuk berkembang dengan memanfaatkan kekosongan otoritas negara dan konflik lokal.

Dalam sejarah perjalanan gerakan radikalisme Zaki Mubarak (2015) membagi proses transformasi gerakan dalam empat fase; dari DI sebagai fase pertama, komando jihad 1970 hingga 1980-an sebagai fase kedua, dan gerakan teror yang muncul di akhir 1990-an dan pasca reformasi sebagai fase ketiga. Fase keempat ditandai dengan munculnya gerakan radikal baru dari generasi muda yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dari generasi sebelumnya tetapi mendapatkan terpaan ideologi dan peristiwa global.

Dimana posisi JI dalam keempat fase tersebut? JI dengan tokoh sentral Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir menjadi penghubung gerakan masa lalu ke era Pasca reformasi. Dari tahun 1970an-1980an, kiprah keduanya telah tercatat sebagai bagian dari anggota DI yang memilih jalur kaderisasi. Keduanya menjadi ideolog dan fasilitator mobilisasi para anak-anak muda untuk berangkat ke Afganistan pada tahun 1980-an. Dari tunas para pejuang Afganistan inilah jaringan dan gerakan teror

muncul. JI, tidak bisa dipungkiri mempunyai peran signifikan sebagai penghubung sejarah dan mimpi gerakan radikal masa lalu dalam konteks kekinian dengan berhasil membangun jaringan, kaderisasi dan konservasi cita-cita islamisme.

Jika Zaki Mubarak mengistilahkan dengan proses transformasi sebagai pola pergantian bentuk dengan ideologi yang masih sama, sesungguhnya yang terjadi adalah proses fragmentasi sel jaringan terorisme dengan ideologi dan tujuan yang sama. Fragmentasi didorong oleh perpecahan sel terorisme dengan perubahan metode dan pendekatan, tetapi tidak merubah ideologi dan cita-cita gerakan. Fragmentasi JI misalnya memunculkan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang digagas oleh Baasyir dan Irfan Nawas. Ketidakcocokan dalam manhaj dan gerakan, mendorong lahirnya Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sebagai rumah baru Baasyir.

Pada pertengahan 2014, kemunculan ISIS menjadi idola baru bagi generasi muda yang memiliki jiwa militant di Indonesia. Abu Bakar al-Bagdadi mungkin lebih populer dari Abu Bakar Baasyir yang mampu menyilaukan mata anak muda berangkat ke Suriah pada era keemasan ISIS. Aman Abdurrahman yang semula bergabung dalam JAT membentuk fragmen sempalan baru dengan melahirkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dengan semangat yang lebih militan dengan memilih kiblat ideologi takfiri ISIS yang sangat ekstrem.

Meskipun terpecah dalam berbagai fragmen sel jaringan yang ada, secara ideologis ada empat prinsip sebagai simpul kesamaan yang dimiliki beragam gerakan radikal di Indonesia yakni : impian kekuasaan negara Islam (khalifah), memutus hubungan dengan masyarakat kontemporer yang tidak suci (dalam istilah ekstrem jahiliyah), konsep takfiri termasuk kepada muslim tidak setuju apalagi menghalangi agenda mereka, dan sistem teokrasi untuk formalisasi syariat sebagai konstitusi (Mubarak, 2015). Dengan munculnya berbagai fragmen sel jaringan, ideologi dan tipologi pemikiran masih menjadi penanda yang tidak bisa dihilangkan

sebagai titik temu. Apapun bentuk organisasi dan fragmentasi yang akan muncul, empat ciri ideologi dan pemikiran tersebut akan selalu sama, hanya bergeser pada perbedaan pola dan strategi.

Tantangan Fragmentasi Sel Teroris dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Gerakan sosial tidak bersifat homogen, tetapi selalu ada friksi internal yang mewarnai. Munculnya perbedaan tujuan, strategi atau distribusi dan perebutan sumber daya menjadi sebab kerapuhan dalam sebuah gerakan sosial yang memunculkan gerakan baru atau sempalan (Zald dan McCharthy, 1977). Konflik internal bisa terjadi karena ada perbedaan pandangan tentang cara dan metode mencapai tujuan. Ketika beberapa kelompok merasa strategi tidak relevan mereka akan memisahkan diri dengan membentuk kelompok baru.

Selain karena perubahan dan dinamika internal, faktor eksternal yang berupa tekanan dan ruang sosial yang tidak kondusif bisa mendorong perubahan (Tarrow, 1994). Kelompok sosial yang sedang menghadapi tantangan untuk bertahan dari tekanan kelompok luar akan menyebabkan fragmentasi. Dalam proses menghadapi tekanan tersebut, satu bagian akan memilih beradaptasi dan mengadaposi dengan sikap moderat, sementara kelompok yang lain tetapi memilih pandangan lama dengan jalur yang ekstrem.

Jika kita membaca fenomena pembubaran JI tidak cukup hanya mengamati secara instan. Proses deklarasi dan ikrar beberapa kelompok besar mantan JI di berbagai daerah tentu harus diapresiasi dengan baik. Mengumbar kecurigaan berlebihan dengan istilah taqiyah, tentu saja, sangat menyakitkan bagi mantan JI yang dengan tulus dan tobat berikrar kembali ke jalan damai dan moderat. Program pembinaan deradikalisasi melalui reedukasi dan reintegrasi sosial mutlak harus digencarkan. Pendampingan dan pembinaan terhadap berbagai lembaga

pendidikan JI harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kementerian terkait dan masyarakat.

Namun, hal yang tidak kalah penting dari pembinaan tersebut adalah mencegah fragmentasi sel jaringan JI. Proses investigasi dan penelusuran yang mendalam tentang efek perpecahan internal dalam JI akibat dari deklarasi pembubaran ini harus dilakukan. Adakah kelompok sempalan atau mutasi sel baru JI akibat perbedaan interpretasi ideologis yang muncul. Pembubaran JI tidak hanya pada aspek organisasi, tetapi juga orientasi manhaj yang berubah. Berbeda dengan perbedaan awal JI yang hanya seputar perbedaan strategi gerakan.

Jika JI lahir sebagai fragmen baru dalam DI yang sudah dianggap tidak efektif, bagaimana dengan pembubaran JI? Jika dalam konteks perbedaan pendekatan dan strategi saja dapat memunculkan fragmen, tentu saja perubahan ideologis dari pembubaran JI ini meniscayakan fragmentasi baru. Apalagi struktur jaringan terorisme modern sebagaimana Sageman (2004) mengamati Al Qaeda tidak lagi berbentuk hierarki ketat seperti organisasi militer, tetapi lebih berupa sel-sel kecil yang saling terkait dan bersifat fleksibel. Kelompok besar lebih hanya sebagai inspirasi bagi sel-sel kecil dan individu yang menjalankan aksi mandiri.

Secara "keyakinan teoritis", penolakan tentu saja bukan pada aspek pembubaran JI, tetapi pada perubahan ideologi dan pemikiran yang lebih moderat. Sebagian besar anggota JI yang moderat akan menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan berusaha mengintegrasikan nilai lama dalam konteks yang baru. Namun, jangan lupa akan muncul kelompok yang tidak sepakat dengan memilih mengkonservasi pandangan dan ideologi awal dan memperkuat militansi walaupun dalam bentuk tanzim sirri (organisasi rahasia). Karena itulah, selain proses edukasi dan pembinaan terhadap eks JI, identifikasi dan pemetaan lebih lanjut terkait fragmentasi dan kemungkinan pembentukan sel baru pasca pembubaran adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Aparat keamanan dan intelijen

dituntut lebih jeli dalam memantau dinamika yang terjadi dan mengantisipasi munculnya sel-sel baru yang melanjutkan ideologi gerakan JI.

KESIMPULAN

Fragmentasi sel jaringan terorisme di Indonesia, termasuk JI, menunjukkan bahwa pembubaran suatu organisasi tidak serta-merta berarti berakhirnya ancaman ideologis maupun gerakannya. Dalam banyak kasus, seperti yang dialami oleh DI sebelumnya, fragmentasi sering kali menghasilkan kelompok sempalan yang memiliki orientasi ideologis yang sama tetapi dengan metode yang berbeda, bahkan lebih ekstrem. Oleh karena itu, deklarasi pembubaran JI harus dilihat secara mendalam untuk mengantisipasi munculnya sel-sel baru yang dapat melanjutkan ideologi ekstremisme dengan wajah dan strategi yang berbeda.

Program deradikalisasi dan reintegrasi sosial tetap menjadi kunci utama dalam mencegah regenerasi dan mutasi jaringan teroris. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memantau dan membina kelompok-kelompok mantan JI agar tidak kembali terjebak dalam narasi ekstremisme. Selain itu, pendekatan multidimensi, termasuk penguatan pendidikan moderat dan pengawasan terhadap potensi munculnya jaringan baru, sangat penting untuk memastikan bahwa fragmentasi ini tidak menjadi awal dari siklus kekerasan baru.

Daftar Pustaka

- Bruinessen, M. van. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154.
- Fealy, G., & Borgu, A. (2005). *Local jihad: Radical Islam and terrorism in Indonesia*. Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
- Gunaratna, R. (2002). *Inside Al Qaeda: Global network of terror*. Columbia University Press.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2017). *The re-emergence of Jemaah Islamiyah: A primer*. IPAC Report No. 36.

Mubarak, M. Z. (2015). Dari NII ke ISIS: Transformasi ideologi dan gerakan dalam Islam radikal di Indonesia kontemporer. *Epistemé*, 10(1), 78–98.

Sageman, M. (2004). *Understanding terror networks*. University of Pennsylvania Press.

Sholahuddin. (2011). *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme Indonesia*. Depok : Komunitas Bambu.

Tarrow, S. (1994). *Power in movement: Social movements and contentious politics*. Cambridge University Press.

Zald, M. N., & McCarthy, J. D. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241

K A J I A N

PERUBAHAN PETA ANCAMAN IDEOLOGI TRANSNASIONAL PASCA PEMBUBARAN JAMAAH ISLAMIYYAH

Nurrochman

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Subhanul Wathon Magelang



Pembubaran Jamaah Islamiyyah secara sukarela pada akhir Juni 2024 lalu mengindikasikan sejumlah hal. Pertama, pembubaran diri JI itu membuktikan bahwa agenda deradikalisasi yang diupayakan pemerintah membuahkan hasil. Pembubaran JI merupakan jawan nyata atas beragam komentar miring terhadap deradikalisasi yang kerap dicap sebagai proyek membuang anggaran. Kedua, pembubaran JI mengindikasikan adanya pergeseran pandangan kelompok radikal-

ekstrem. Kesediaan para petinggi dan anggota JI untuk membubarkan organisasinya ini menandakan bahwa mereka mulai melupakan mimpi mendirikan negara atau kekhalifahan Islam.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah pembubaran diri JI ini lantas menjadi akhir gerakan terorisme. Apakah itu artinya, kita sudah berhasil mengeliminasi ancaman ideologi transnasional? Jika merujuk pada pemikiran Alex Lubin dalam bukunya *Never-Ending War on*

Terror, perang melawan terorisme itu sejatinya tidak akan pernah berakhir (Lubin, 2021). Terorisme sebagai sebuah ideologi kekerasan akan terus ada sepanjang keberadaan umat manusia di muka bumi. Terorisme bisa bersalin rupa, nama, motif, dan strategi. Namun, hakikat terorisme tetap sama, yakni merenggut rasa aman dan menghadirkan rasa takut serta cemas di tengah masyarakat.

Mengacu pada tesis Lubin tersebut, sepertinya bubarnya Jamaah Islamiyyah bukanlah akhir dari perang melawan terorisme. Pembubaran JI hanya mengubah peta gerakan terorisme di Asia Tenggara dan Indonesia. Ancaman ideologi transnasional seperti daulahisme atau khilafatisme masih akan tetap ada pasca bubarnya JI. Hanya saja, aktor, strategi, dan model penyebarannya yang akan mengalami pergeseran. Tulisan ini membahas ihwal pergeseran peta gerakan ideologi transnasional pasca bubarnya organisasi Jamaah Islamiyyah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari referensi (buku, artikel jurnal, dan opini media massa) yang diolah dengan pendekatan analisis konten.

Residu Pembubaran Jamaah Islamiyyah

Sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini melawan gerakan berbasis ideologi transnasional, pembubaran organisasi radikal itu hampir selalu menyisakan residu yang tidak tuntas. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Juli 2017 misalnya, tidak serta-merta mengeliminasi penyebaran ideologi khilafah di Indonesia. HTI bermetamorfosa dan berkamuflase ke dalam berbagai cara. Ada yang menyusup ke berbagai organisasi keagamaan. Ada yang membentuk ormas baru dengan nama Komunitas Royyatul Islam (Karim). Ada pula yang mem-branding diri sebagai influencer di media sosial. (M. Ishom el Saha & Transformasi HTI?, 2025).

Demikian juga dengan pembekuan Front Pembela Islam (FPI) pada akhir 2020 juga menyisakan persoalan yang sama. FPI lahir kembali dengan nama Forum Persaudaraan

Islam. Meski beda nama, namun para petinggi dan agendanya tetap sama. Inilah yang patut kita khawatirkan dari pembubaran diri JI. Muhammad Sofyan, mahasiswa Program Studi Kajian Terorisme, Pascasarjana Universitas Indonesia menulis tesis berjudul "Pembubaran Jamaah Islamiyyah Melalui Lensa Teori Transformasi Organisasi dan Pilihan Rasionalitas" membahas tentang pembubaran JI dari sudut pandang internal organisasi. Argumen yang ia ketengahkan dalam tesis tersebut adalah pembubaran diri JI ini berkaitan dengan transformasi organisasi dan juga pilihan rasionalitas (Sufyan, 2025).

Sofyan menilai, sebagai sebuah organisasi, JI tidak berkembang selama beberapa tahun terakhir, karena pengawasan ketat aparat pemerintah. Label sebagai organisasi teroris membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan organisasi. Padahal, JI ini bukan sekadar organisasi bawah tanah. JI juga memiliki banyak aset usaha, terutama di bidang pendidikan, yakni sejumlah sekolah dan pesantren. JI dihadapkan pada pilihan yang dilematis, antara mempertahankan organisasi dengan risiko seluruh aset dibekukan pemerintah, atau membubarkan diri untuk menyelamatkan aset. Pilihan kedua inilah yang bisa dibilang paling rasional.

Apa pun motifnya, pembubaran diri JI dan deklarasi ribuan eks-anggotanya untuk kembali ke NKRI tentu patut diapresiasi. Namun, yang patut dikhawatirkan adalah munculnya kelompok sempalan yang tidak taat keputusan organisasi dan memilih untuk bermanuver sendiri. Kelompok sempalan ini bisa saja menggunakan jaringan yang dibangun oleh JI selama ini untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Namun demikian, pembubaran diri JI ini tidak bisa lantas diartikan sebagai akhir dari propaganda ideologi transnasional. Ideologi khilafatisme, daulahisme, dan sejenisnya dipastikan masih akan tetap mewarnai diskursus keagamaan kita. Dalam artian, ideologi transnasional tidak akan sepenuhnya hilang dari ruang publik pasca pembubaran diri JI.

Fragmentasi Ekstremis di Balik Pembubaran Jamaah Islamiyah

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Tempo pada tahun 2020, pakar terorisme Sidney Jones menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target jaringan teroris untuk dijadikan pusat gerakan di Asia Tenggara. Indonesia dipilih, lantaran memungkinkan secara demografis maupun geografis. Secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sebagai negara muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia tentu menjadi semacam pangsa pasar yang menggiurkan bagi gerakan berbasis ideologi transnasional. Dengan menguasai Indonesia, maka cita-cita mendirikan kekhalifahan Islam di Asia Tenggara akan semakin terbuka lebar (Tempo, 2020).

Sedangkan dari sisi geografis, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbentuk kepulauan memungkinkan para teroris untuk keluar masuk tanpa pengawasan yang ketat. Sidney menjelaskan bagaimana para teroris dari Indonesia bebas keluar masuk, menyeberang ke Mindanao, Filipina atau Malaysia, bahkan sampai ke Afganistan dan Pakistan melalui jalur tikus yang juga dipakai untuk menyelundupkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pernyataan Sidney ini kiranya bisa menjadi dasar bahwa terorisme masih akan tetap eksis di Indonesia, meski sejumlah organisasi yang menaunginya telah dibubarkan.

Jika dilihat dari realitas yang mengemuka saat ini, pembubaran diri JI akan terfragmentasi ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang secara tulus mengikuti keputusan para petinggi untuk membubarkan JI dan kembali ke pangkuan NKRI. Kedua, kelompok yang menyempal dari keputusan pembubaran diri JI dan menyeberang ke organisasi-organisasi dengan misi serupa seperti Jamaah Ansharud Daulah atau Jamaah Ansharut Tauhid. Meski jumlahnya minoritas, namun keberadaan kelompok sempalan ini patut diwaspadai. Tersebab, mereka ini masih mewarisi spirit militansi JI yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk melakukan aksi amaliyah.

Ketiga, kelompok sempalan yang tidak memiliki militansi untuk melakukan aksi amaliyah, namun tetap bersemangat dalam mempropagandakan negara dan kekhalifahan Islam. Mereka ini kemungkinan besar akan menempuh jalan “solo karir” dengan menjadi “tentara siber” (cyber army) yang menebar propaganda ekstremisme di kanal-kanal media sosial. Para tentara siber ini pada dasarnya tidak kalah berbahayanya dengan kelompok sempalan yang masih mewarisi militansi JI. Jika sempalan militan itu dikhawatirkan akan menghidupkan sel-sel tidur teroris yang berujung pada aksi amaliyah, maka tentara siber berpotensi membanjiri kanal maya dengan propaganda ideologi transnasional.

Ini artinya, peta gerakan berbasis ideologi transnasional akan mengalami pergeseran. Di awal infiltrasinya di Indonesia pada dekade 1980-an, ideologi transnasional banyak disebarkan melalui kampus-kampus, terutama Lembaga Dakwah Kampus. Maka menjadi wajar jika ideologi transnasional menyebar di kalangan kelas menengah terdidik-urban. Kini, gerakan ideologi transnasional memasuki babak baru, yakni fase digitalisasi yang menysasar semua kelompok masyarakat dari segala lapisan dan latar belakang. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin ideologi transnasional bisa menjadi semacam wabah sosial-politik yang berbahaya di masa depan.

Media Sosial Sebagai Arena Kontestasi Ideologi Keagamaan

Perubahan peta gerakan ideologi transnasional pasca-pembubaran diri JI ini patut dimitigasi sejak dini. Perang melawan teror kini tampaknya mulai bergeser dari dunia nyata ke maya. Media sosial kini telah menjadi arena battle ground baru bagi pertarungan wacana dan ideologi keagamaan. Di dunia maya, peperangan tidak ditentukan oleh kekuatan senjata api, kemampuan intelejen, atau jumlah pasukan. Faktor paling dominan dalam kemenangan peperangan di ranah digital adalah kekuatan narasi dalam membangun opini dan menggiring persepsi publik.

Siapa yang paling banyak memproduksi sekaligus mendistribusi informasi pengetahuan, sekaligus membangun narasi yang dominan di ruang publik digital, dialah yang akan menguasai algoritma jagad medsos. Ketika algoritma media sosial berhasil didominasi, maka jalan untuk menghegemoni publik dengan ideologi tertentu itu semakin terbuka lebar. Untuk saat ini, harus diakui bahwa kelompok konservatif pengusung ideologi transnasional cenderung lebih dominan di medsos ketimbang kaum moderat. Narasi konservatisme keagamaan yang dibungkus ke dalam jargon seperti “hijrah”, “islam kaffah”, “kembali ke quran dan sunnah”, dan lain sebagainya mendapat simpati dari kalangan milenial dan generasi Z.

Ironisnya, di saat yang sama paradigma moderasi beragama yang digadang-gadang menjadi benteng dari infiltrasi ideologi transnasional cenderung kurang bergaung di dunia maya. Moderasi beragama selama ini masih menjadi wacana seremonial-elitis yang berkembang di kalangan tertentu saja, terutama golongan akademik. Tantangan ke depan adalah bagaimana merancang diseminasi paradigma moderasi beragama dalam lanskap digital. Agenda moderasi beragama harus dikemas ke dalam narasi yang menarik, digital friendly, dan tentunya mudah dipahami oleh milenial dan gen z. Dengan begitu, dominasi narasi konservatisme beragama di jagad maya bisa digusur.

Kesimpulan

Penyebaran ideologi transnasional tidak akan pernah berakhir, selama imajinasi tentang berdirinya negara atau kekhalifahan Islam masih laku di tengah umat. Ideologi daulahisme, khilafahisme, dan sejenisnya juga masih akan mendapat simpati di tengah umat, jika ideologi moderat seperti nasionalisme dan demokrasi gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Maka, selain pengarus-utamaan paradigma moderasi beragama, salah satu cara membendung gerakan ideologi transnasional adalah dengan merevitalisasi nasionalisme dan demokrasi. Nasionalisme dan demokrasi sebagai produk peradaban modern harus mampu

mewujudkan cita-cita tentang keadilan dan kesejahteraan. Dengan begitu, tidak akan ada ruang bagi tumbuhnya ideologi transnasional yang anti-nasionalisme dan demokrasi.

Referensi

- Arifin, Syamsul. Utopia Negara Khilafah; Ideologi dan Gerakan Sosial Hizbut Tahrir. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Lubin, Alex. Never-Ending War on Terror. Los Angeles: University of California Press, 2021.
- el Saha, M. Ishom. “Komunitas Royyatul Islam; Transformasi HTI?”, dalam www.nu.or.id, diakses pada tanggal 11 Januari 2025.
- Sufyan, Muhammad. “Pembubaran Jamaah Islamiyyah Melalui Lensa Teori Transformasi Organisasi dan Pilihan Rasionalitas”, Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2025.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, Sidney Jones: Meneropong Terorisme di Indonesia. Jakarta: Tempo Publishing, 2020.

K A J I A N



***TRANSITIONAL JUSTICE* UNTUK MANTAN ANGGOTA TERORIS: PEMBUBARAN AL JAMAAH AL ISLAMIYAH (JI)**

Tsabita Afifah Khoirunnisa & Sapto Priyanto

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah (JI) pada tahun 2024 merupakan pencapaian yang signifikan dalam upaya kontra-terorisme di Indonesia, karena langkah ini mencerminkan keberhasilan program deradikalisasi yang telah diimplementasikan secara komprehensif di negara ini (Sukabdi, 2025). Dalam laporan World Terrorism Index tahun 2024, sosialisasi terkait pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah (JI) telah dilaksanakan sebanyak 45 kali di berbagai lokasi di Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 8.000 partisipan (Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE), 2025). Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Para Wijayanto di tahun 2019, mantan amir (pemimpin) JI, kelompok ini diperkirakan memiliki sekitar 6.000 anggota. Dengan merujuk pada data tersebut—meskipun tanpa memperhitungkan potensi perubahan jumlah anggota—kegiatan sosialisasi ini secara teoritis

telah menjangkau sebagian besar anggota JI.

Meskipun Al Jamaah Al Islamiyah (JI) telah membubarkan diri, proses pasca-demobilisasi tetap menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh mantan anggotanya, mulai dari proses hukum hingga reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam panduan ‘United Nations Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration Standard (UN IDDRS)’, demobilisasi atau pembubaran secara sukarela menandakan, secara resmi, perubahan status seseorang dari anggota kelompok bersenjata (kombatan) menjadi warga sipil (UN DDR, 2006). Akan tetapi, perubahan status hukum ini tidak membuat mantan anggota JI lepas dari past injustice yang telah dilakukannya.

Selain itu, proses demobilisasi juga membawa tantangan signifikan dalam reintegrasi, mengingat mantan anggota JI mungkin

menghadapi kesulitan dalam melepaskan identitas in-group mereka. Identitas ini kerap diperkuat oleh historical animosity terhadap aparat penegak hukum, stigmatisasi dari masyarakat, serta rasa kehilangan tujuan hidup yang sebelumnya didapatkan dari keterlibatan mereka dalam kelompok. Oleh karena itu, pendekatan transitional justice diperlukan sebagai langkah awal dalam upaya peacebuilding yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menangani keadilan transisional tetapi juga untuk memfasilitasi integrasi sosial dan pemulihan hubungan antara mantan anggota JI dan masyarakat luas.

Transitional Justice

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan transitional justice sebagai serangkaian proses dan mekanisme yang dirancang untuk membantu masyarakat mengatasi dampak 'large-scale past abuses' (pelanggaran masa lalu berskala besar) (UN DDR, 2023), termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks demobilisasi, penerapan transitional justice berarti menempatkan pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah (JI) tidak hanya sebagai upaya mencapai negative peace (absence of direct violence), tetapi juga sebagai langkah menuju penciptaan positive peace yang berkelanjutan.

Transitional justice mencakup sejumlah tujuan yang saling terkait untuk mengatasi ketidakadilan masa lalu sekaligus mendorong proses rekonsiliasi. Tujuan tersebut meliputi pengungkapan kebenaran tentang peristiwa-peristiwa historis, pengakhiran impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia—baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung—serta pemberian kompensasi yang adil bagi para korban (International Peace Institute, 2013). Selain itu, transitional justice juga bertujuan memperkuat supremasi hukum, membuka jalan bagi rekonsiliasi jangka panjang dan transformasi politik, serta memastikan adanya jaminan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa

mendatang (International Peace Institute, 2013). Transitional justice ini tidak terbatas pada langkah-langkah hukum (legal measures), tetapi juga mencakup langkah-langkah non-hukum (non-legal measures). Implementasi transitional justice melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi berbagai aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil (civil society organizations), institusi pendidikan, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya.

Penerapan transitional justice harus berlandaskan empat elemen utama, yaitu truth seeking, criminal prosecution, reparation, dan guarantee of non-repetition, yang dilandasi oleh pendekatan berorientasi korban (victim-centered approach) (UN DDR, 2023). Gong (2013) mengklasifikasikan elemen-elemen tersebut ke dalam kerangka retributive justice, restorative justice, reparative justice, dan social justice. Truth seeking bertujuan mengungkap dan mengakui pelanggaran yang terjadi selama konflik untuk memberdayakan korban dengan memberi mereka ruang bersuara. Criminal prosecution menegaskan pertanggungjawaban pelaku sebagai upaya melawan impunitas, membongkar jaringan, dan menegaskan prinsip bahwa tidak ada individu kebal hukum. Reparation melibatkan mekanisme non-yudisial berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hingga aksi simbolis seperti pembangunan monumen atau permintaan maaf resmi untuk mengakui penderitaan korban. Guarantee of non-repetition bertujuan mencegah kekerasan berulang, dalam konteks kontra-terorisme dapat berupa upaya-upaya preemptif dan preventif.

Transitional Justice untuk Mantan Anggota Teroris

Salah satu implementasi transitional justice dalam proses perdamaian di Indonesia dapat dilihat pada perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, perjanjian tersebut hanya memuat klausul terkait amnesti, tanpa mencakup mekanisme pemulihan keadilan secara menyeluruh (Gong, 2013). Gong (2013) mengkritik bahwa Pengadilan HAM di

Indonesia memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya menyelidiki kejahatan yang terjadi setelah tahun 2000 dan terbatas pada genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Junaedi (2018) menekankan bahwa pelanggaran HAM berat tidak semata-mata merupakan isu hukum, tetapi juga mengandung dimensi politik yang membedakannya dari kejahatan biasa.

Namun, dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan langkah-langkah transitional justice bagi mantan anggota JI. Penetapan JI sebagai organisasi terlarang pada tahun 2008 (2189/Pid.B/PN/JKT.Sel) juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan terkait upaya tersebut. Penting untuk ditekankan bahwa implementasi transitional justice bertujuan mengungkap kebenaran, mengakhiri impunitas, dan memperkuat supremasi hukum yang berpihak pada korban, karena korban merupakan sumber utama legitimasi dalam proses ini (Oettler, 2017). Berikut langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses transitional justice mantan anggota JI.

Retributive Justice: Criminal Prosecution

Penuntutan pidana memainkan peran penting dalam menutup kesenjangan impunitas, memulihkan supremasi hukum, dan menumbuhkan budaya hak asasi manusia, sementara para pelaku sering kali mencari amnesti atau kekebalan untuk menghindari akuntabilitas (International Peace Institute, 2013). Pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah (JI) dapat mempertimbangkan kerangka dari Special Jurisdiction for Peace (JEP) Kolombia, yang pada bulan Maret 2018 mulai meneliti kasus-kasus yang melibatkan lebih dari 6.000 mantan anggota FARC (International Crisis Group, 2018) untuk menentukan penuntutan

yang tepat atas kejahatan masa lalu mereka.

JEP menetapkan kerangka kerja terstruktur untuk menuntut mantan anggota FARC dengan mengklasifikasikan kejahatan mereka ke dalam tiga kategori. Kategori pertama mencakup kejahatan politik dan kejahatan terkait, sedangkan kategori kedua mencakup kejahatan yang bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius atau pelanggaran terhadap anggota militer. Terakhir, kategori ketiga membahas kejahatan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius (International Commission of Jurists, 2019). Klasifikasi ini memberikan dasar yang jelas untuk menentukan tanggapan hukum dan sanksi yang tepat untuk setiap jenis pelanggaran.

Pada sistem JEP ini, pelaku secara aktif berkontribusi pada pengakuan kebenaran dan tanggung jawab, yang menjadi dasar sanksi mereka (International Commission of Jurists, 2019). Misalnya, pelaku yang sepenuhnya mengakui tindakan mereka dapat menerima sanksi khusus, yaitu pembatasan pergerakan atau tempat tinggal selama 5–8 tahun dan partisipasi dalam program yang memberikan manfaat bagi korban. Pengakuan yang terlambat mengakibatkan sanksi alternatif, seperti hukuman penjara selama 2–8 tahun. Mereka yang menolak untuk mengakui tindakan mereka akan menghadapi sanksi biasa, dengan hukuman penjara berkisar antara 15–20 tahun.

Restorative Justice: Truth Commission

Truth commission diciptakan sebagai mekanisme yang berpusat pada korban dengan fokus pada penyembuhan melalui penceritaan dan pengakuan publik atas kejahatan (Oettler, 2017). Transitional justice ini mengatasi akar penyebab konflik dan menawarkan rekomendasi untuk mengatasi impunitas (International Peace Institute, 2013). Namun, komponen ini memiliki keterbatasan karena memerlukan pendanaan berkelanjutan dan dukungan politik agar efektif, serta terdapat risiko nyata bahwa komponen ini semakin dipandang sebagai 'obat mujarab', yang dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian untuk memberikan pilihan bagi para pemimpin

yang ingin menghindari pertanggungjawaban pidana (International Peace Institute, 2013).

Restorative justice bertujuan untuk menetapkan kebenaran terhadap masa lalu dan mendamaikan perpecahan sosial. Komponen transitional justice ini lebih kompleks karena harus mempertimbangkan konteks historis terbentuknya organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) serta perannya di masyarakat, baik sebagai organisasi masyarakat, institusi pendidikan (pondok pesantren), maupun sebagai badan usaha. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bagaimana restorative justice di Indonesia diimplementasikan dengan menggunakan istilah 'islah' (Priyanto dkk., 2020). Penelitian tersebut mempertemukan korban dan pelaku teror, di mana korban memaafkan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pelaku (Priyanto dkk., 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa restorative justice dengan metode 'islah' menyadarkan pelaku teror akan kesalahannya dan mencegah kemungkinan residivisme (Priyanto dkk., 2020).

Reparative Justice: Reparation

Reparative Justice bertujuan untuk memberikan ganti rugi atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk simbolis maupun finansial. Reparasi ini bisa berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terjadinya pengulangan (International Peace Institute, 2013). Melalui langkah reparasi ini, para pelaku mengakui korban sebagai pihak yang telah dirugikan secara tidak adil dan berhak untuk mendapatkan kompensasi (International Peace Institute, 2013).

Sosialisasi pembubaran Al Jamaah Al Islamiyah yang dilakukan lebih dari 40 kali di tahun 2024 merupakan aksi simbolis, namun kegiatan tersebut belum berpihak kepada korban. Oleh karena itu, salah satu langkah reparasi yang dapat diambil adalah memorial (peringatan). Memorialisasi adalah proses yang bertujuan untuk menghormati korban yang menderita atau meninggal selama konflik dan sebagai sarana untuk memeriksa masa

lalu serta mengatasi masalah kontemporer (Barsalou & Baxter, 2007). Selain itu, dengan adanya memorialisasi, dapat mengurangi historical animosity dan stigmatisasi yang ada di masyarakat. Dalam implementasi reparative justice ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya siapa saja yang merupakan korban pelanggaran, siapa penggugat dan penerima manfaat reparasi, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas viktimisasi dan berkewajiban memberikan reparasi (Arnould & Parmentier, 2017).

Social Justice: Guarantees of Non-Recurrence

Elemen terakhir adalah keadilan sosial, yang biasanya berkaitan dengan reformasi institusi. Reformasi yang umum mencakup bentuk pertanggungjawaban non-kriminal (program penyaringan dan lustrasi) serta pemulihan supremasi hukum (reformasi peradilan dan konstitusional) (International Peace Institute, 2013). Dalam kasus FARC-EP, strategi yang digunakan untuk keadilan transisional ini adalah dengan memberikan insentif untuk reintegrasi, memerangi kekerasan yang berkelanjutan, dan memperkuat tata kelola (International Crisis Group, 2013). Biasanya, dalam konteks konflik, keadilan transisional ini mencakup Reformasi Sektor Keamanan (SSR). Akan tetapi, elemen ini melibatkan semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan serius terjadi lagi (UN DDR, 2023).

Dalam konteks JI, sangat penting untuk menciptakan jalur di mana mantan anggota tersebut tidak kembali menggunakan kekerasan atau terlibat dalam aktivitas terkait terorisme. Seperti yang tercantum dalam Laporan Khusus pada World Terrorism Index 2024, 'fokus yang hanya pada langkah-langkah hukum terkait pembubaran organisasi kurang efektif—dalam kasus JI dan JAD—karena masih ada aktivitas berulang yang terkait dengan terorisme seperti perekrutan, pendanaan, dan pelatihan (Wardhana, 2025)'. Transitional justice terkait dengan jaminan tidak terulangnya pelanggaran

dapat difokuskan pada langkah-langkah preventif dan preemptif, seperti membangun pengawasan eksternal yang efektif serta mekanisme penyaringan dan seleksi lainnya yang membantu membongkar jaringan kriminal dan membangun kepercayaan terhadap institusi sektor publik. Karena transitional justice berpusat pada korban, upaya yang diambil harus mengurangi historical animosity, stigmatisasi, dan mendorong reintegrasi sebagai komitmen terhadap jaminan tidak terulangnya kekerasan.

Pembubaran JI memiliki dampak yang signifikan terhadap potensi penyebaran paham radikal kepada lebih dari 100.000 – 150.000 orang melalui kurang lebih 90 lembaga pendidikannya (Prindani, 2025). Tantangan utama dalam mengimplementasikan keadilan transisional dalam konteks mantan anggota JI terletak pada korban. Implementasi transitional justice yang berorientasi pada korban dalam konflik simetris dapat diukur secara geografis, sedangkan korban dalam konflik asimetris dan perang hibrida sulit untuk diukur kerugian dan penderitaannya. Oleh karena itu, selain langkah proaktif untuk mantan anggota JI, perlu juga ada langkah proaktif untuk para korban yang telah dirugikan akibat aktivitas terorisme yang dilakukan oleh anggota JI.

Kesimpulan

Penerapan transitional justice untuk mantan anggota Al Jamaah Al Islamiyah (JI) merupakan salah satu upaya dalam menciptakan positive peace yang berkelanjutan. Keadilan transisional ini memerlukan pendekatan keberpihakan terhadap korban, yang mencakup pengungkapan kebenaran, penuntutan pidana, reparasi, dan jaminan tidak adanya pengulangan. Melalui victim-centered approach, implementasi transitional justice untuk mantan anggota JI perlu mengedepankan pengukuran yang tepat atas kerugian dan penderitaan yang dialami korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat aktivitas terorisme yang dilakukan oleh JI.

Referensi

- Arnould, V., & Parmentier, S. (2017). Building (Regional) Bridges for Transitional Justice.
- Barsalou, J., & Baxter, V. (2007). The Urge to Remember: The Role of Memorials in Social Reconstruction and Transitional Justice.
- Gong, L. (2013). Transitional Justice in South and Southeast Asia: Integrating Judicial and Non-Judicial Measures.
- International Commission of Jurists. (2019). Colombia: The Special Jurisdiction for Peace, Analysis One Year and a Half After its Entry into Operation.
- International Crisis Group. (2013). Guarantees of Non-Repitition. Dalam Transitional Justice and Colombia's Peace Talks. International Crisis Group.
- International Crisis Group. (2018). Transitional Justice. Dalam Risky Business: The Duque Government's Approach to Peace in Colombia.
- International Peace Institute. (2013). The Search for Justice, Peace, and Reconciliation. Dalam Peace, Justice, and Reconciliation in Africa: Opportunities and Challenges in the Fight against Impunity (hlm. 10–26). International Peace Institute.
- Junaedi, J. (2018). Human Rights Court and Truth Reconciliation Commission for the Settlement of Human Rights in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/iclr.1104>
- Oettler, A. (2017). Transitional Justice, Recognition, and Authoritative Power.
- Prindani, A. (2025). Pembubaran al-Jamaah al-Islamiyah: Sebuah Strategi Intelijen. Dalam *World Terrorism Index 2024*. Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE).
- Priyanto, S., Dermawan, M. K., & Runturambi, A. J. S. (2020). Islah As The Key Success Of Terrorist Disengagement Process In Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 15. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol15no1.11>
- Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE). (2025). *World Terrorism Index 2024*.
- Sukabdi, Z. A. (2025). Refleksi Rehabilitasi Terorisme Indonesia di 2024. Dalam *World*

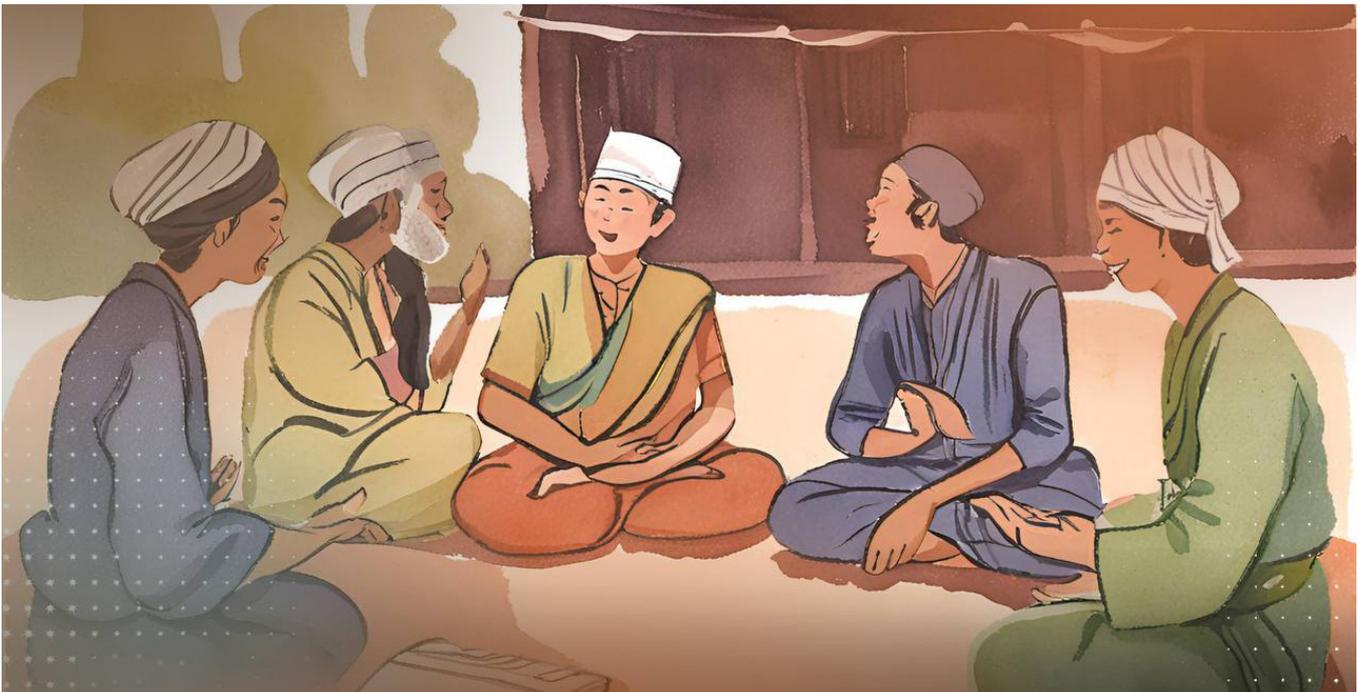
- Terrorism Index 2024 (hlm. 100). Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE).
- UN DDR. (2006). Demobilization. Dalam Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards. United Nations.
- UN DDR. (2023). DDR and Transitional Justice. Dalam Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards. United Nations.
- Wardhana, I. M. W. (2025). Indonesia Zero Terrorist Attack: Menuju Situasi Damai atau Menanti Kejutan Berikutnya? Dalam World Terrorism Index 2024. Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE).

K A J I A N

MENGUJI RETORIKA MANIS “DAKWAH SEBELUM JIHAD”: STUDI DINAMIKA KONSEP JIHAD JAMAAH ISLAMIYAH

Haris Fatwa

Analisis Narasi Media dan Tim Penyunting Jurnal Jalan Damai BNPT



Ketika mulai beroperasi di Indonesia, Jamaah Islamiyah menganggap bahwa Indonesia adalah negara campuran. Masyarakatnya Muslim, tetapi pemerintah dan sistem negaranya kufur. Pancasila pun dianggap tagut dan tidak berlandaskan syariat Islam. Ini yang terus dipropagandakan JI melalui amirnya saat itu Abdullah Sungkar kemudian Abu Bakar Ba'asyir sampai tahun 2000 (Temby, 2010). Tetapi, pasca tampuk pimpinan diambil alih Para Wijayanto pada 2008, doktrin kekerasan JI tumpul. Metode dakwah ini sengaja dirubah oleh Para Wijayanto karena menurutnya propaganda kekerasan justru kontra-produktif dengan cita-cita formalisasi syariat ala JI.

Sempat pada tahun 2016, amir JI Para Wijayanto meminta Imtihan Syafii selaku ketua dewan fatwa JI untuk mengkaji Pancasila. Hasilnya, diperoleh bahwa Pancasila tidak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam. Bahkan banyak ayat Al-Qur'an yang dianggap selaras dengan butir-butir Pancasila. Kajian itu menegaskan demarkasi dua kutub JI. Hasil kajian itu ditentang oleh mayoritas anggota JI. Mereka beranggapan bahwa Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam.

Tulisan ini meyakini bahwa bagian kelompok JI yang tidak meng-endorse kekerasan tidak boleh dipahami sebagai pelepasan diri dari potensi terorisme. Mereka tetap menormalisasi kekerasan, hanya saja tidak melihat Indonesia

sebagai medan tempur (darul harbi) yang tepat untuk amaliyah (jihad). Sebagai bukti, rekam jejak JI pasca dipegang Para Wijayanto adalah intensifikasi pelatihan para militer kadernya di Indonesia (Poso), Filipina (Moro), dan Thailand (Pattaya), untuk kemudian dikirim amaliyah ke Suriah di bawah kendali Jabhat al-Nusra. JI berpegang teguh pada prinsip menunda penggunaan kekerasan sampai membangun basis dukungan yang cukup, credo ini disebut “dakwah sebelum jihad” (Hwang, 2019).

Artikel ini membongkar “pergeseran” pendekatan Jamaah Islamiyah dalam melakukan dakwah. Strategi dakwah yang lebih “manis” dan persuasif tampak mulai diadopsi untuk menggantikan retorika kekerasan. Fokus utama artikel ini adalah analisis terhadap perubahan doktrin dakwah JI, serta bagaimana mereka mencoba untuk menyelaraskan doktrin “jihad” dengan situasi di Indonesia. Tulisan ini mengasumsikan bahwa perubahan dalam strategi dakwah ini, meskipun tampak mengurangi kekerasan, tidak menghapuskan potensi aksi teror dan radikalisme.

‘Jihad’ yang Diperebutkan

Pada 2013, sekitar lima anggota JI setuju bahwa Indonesia bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan jihad karena bukan wilayah konflik. Namun, jika konflik bernuansa agama di Indonesia (seperti Ambon dan Poso) pecah, maka itu akan menjadi perang simetris di mana perjuangan bersenjata menurut mereka dapat dibenarkan. Militansi ini dilegitimasi oleh pemimpin spiritual utama JI, Abu Rusydan. Ia mengkritik program deradikalisasi Indonesia karena mendelegitimasi konsep jihad dan mujahid. Bagi Abu Rusydan, ada kriteria yang jelas untuk melakukan jihad. Menurutnya, masalahnya bukanlah penolakan mutlak atau mendelegitimasi aksi bersenjata, melainkan pertanyaan tentang melakukan jihad pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Sementara Indonesia saat ini bukanlah tempat yang tepat, sedangkan Suriah pasca-2012 adalah tempat yang tepat.

Sejak JI berdiri, selalu ada aliran utama dalam jaringan yang menganjurkan “dakwah sebelum jihad”. Peran ini dimainkan oleh Abu Rusydan, Abu Fatih, dan Para Wijayanto. Namun, antara tahun 1998 dan 2004, ada juga sub-kelompok yang jauh lebih kecil tetapi berpengaruh dalam jaringan yang berkomitmen untuk menggunakan kekerasan untuk mempercepat pelaksanaan negara Islam, yang disetir oleh Mukhlas dan Hambali. Dua faksi ini yang kemudian menandai betapa dinamisnya pergerakan internal Jamaah Islamiyah. Dalam konteks faksionalisme ini, kepemimpinan dan struktur organisasi komando regional menjadi tidak kondusif bahkan kacau. Situasi ini membuat Hambali dan Mukhlas leluasa mengoordinasikan serangan tanpa sepengetahuan atau persetujuan seluruh pimpinan. Mereka juga mampu merekrut anggota dari jaringan JI untuk operasi teror Bali 2002 tanpa sepengetahuan pemimpin divisi mereka (Matesan, 2020).

Di luar perbedaan faksi itu, terdapat dua persamaan, pertama adalah bahwa JI secara organisatoris tidak pernah meninggalkan gagasan perjuangan bersenjata. Kedua, konsistensi narasi politik ideologis Islam. Seperti yang dicatat oleh Sidney Jones (2011), JI selalu memiliki visi jangka panjang, dan tetap “berkomitmen” pada negara Islam dan kebutuhan untuk membangun kekuatan untuk mempersiapkan perang melawan musuh-musuh Islam. Oleh sebab itu meski lanskap penanggulangan terorisme relatif berubah, tetapi potensi ancamannya masih bergema. Propaganda terorisme kini bisa lebih sporadis dan berada di kelompok-kelompok kecil berhaluan ekstremis melalui agensi-agensinya yang tak terwadahi. Propaganda itu kini bergerak sendiri-sendiri (lone wolf). Situasi ini justru lebih kompleks mengingat pergerakan teroris dan ekstremis yang sulit ditebak.

Seturut bubarnya JI, credo “dakwah sebelum jihad” tampak tidak kehilangan inangnya. Narasi itu “dikawal” oleh beberapa kelompok radikal teroris lama yang terindikasi masih aktif di media sosial, seperti neo-HTI, wahabi-salafi, Jamaah Ansharu Daulah, dan kelompok sempalan lain berhaluan serupa.

Masa Depan “Jihad” Pasca JI

Artikel ini mengasumsikan konsistensi dakwah JI yang muaranya pasti akan berlabuh pada urgensi “jihad” sebagai “garis finish perjuangan”. Seperti yang telah disinggung, ‘jihad’ memiliki keragaman tafsir dalam internal anggota JI. Sekali lagi, sebagai ilustrasi, di kalangan senior JI, Abdullah Anshori atau Abu Fatih menjadi salah satu figur terhormat yang menolak konsepsi ‘jihad qital’ atau peperangan (di Indonesia). Dalam investigasi Tempo, ia pernah menolak permintaan Abdullah Sungkar yang menawarkan 6.000 eks prajurit Afghanistan Al-Qaeda dan negara lain untuk ‘berjihad’ di Indonesia pada 1990’an. Abu Fatih juga ditengarai mengurungkan niat kelompok teror Poso, Sulawesi Tengah, menembaki pesawat yang ditumpangi petinggi Densus 88 Antiteror Kepolisian RI.

Penolakan Abu Fatih itu mendapat respon keras dari anggota JI berhaluan keras seperti Muklas dan Hambali. Pelaku teror bom Bali tersebut menyalahkan Abu Fatih karena dianggap membuang kesempatan emas dari Usama bin Laden. Perbedaan dua kutub itu membuat gejolak dalam tubuh JI semakin memanas. Situasi ini membuat beberapa anggota JI yang pro-peperangan keluar. Apalagi ketika Jihad ‘damai’ ini dilegitimasi oleh amir JI, Para Wijayanto dan senior JI, Abu Rusydan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan JI tidak bisa dibawa melalui pendekatan kekerasan. Mereka merasa bahwa jika jihad perang ini sesuai dengan syariat Allah, kenapa banyak pejuang mereka yang ditangkap dan tidak selamat.

Tetapi perlu dicatat, semangat “dakwah sebelum jihad” tetap tidak bisa diabaikan. Girah mantan anggota JI untuk meneruskan obsesi pendirinya bagaimanapun masih kuat. Militansi kombatan ini bisa bergerak sendiri atau bergabung dengan organisasi-organisasi yang berpaham kekerasan. JAD, milisi teror bentukan Aman Abdurrahman misalnya bisa dibilang merupakan salah satu tangan kanan ISIS di Asia Tenggara dan masih beroperasi hingga saat ini meskipun dengan kadar pergerakan yang sangat

rendah. JAD masih berorientasi pada kekerasan untuk merealisasikan visi politik ideologisnya.

Bubarnya Jamaah Islamiyah hanya menekan narasi “jihad perang” tetapi tidak menafikan semangat dakwah formalisasi politik ideologis Islam. Mereka percaya bahwa dakwah yang konsisten akan menunjang militansi mereka di bawah tanah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, makna jihad dalam internal JI berkontestasi sejak awal. Melalui celah ini, kita tidak akan melihat eks JI berdakwah untuk mendeklarasikan perang fisik sebagai bagian perjuangan. Nantinya, mereka hanya akan terus melakukan mobilisasi massa, dengan menekankan tentang pentingnya hidup di bawah panji “syariat Tuhan”, urgensi penerapan hukum-hukum normatif agama, dan mengesankan bobroknya sistem modern dengan harapan indoktrinasi berjenjang di bawah alam bawah sadar.

Awal tahun 2024 misalnya, Indonesia kecolongan salah satu event neo-HTI bertajuk “Metamorfoshow; It’s Time to be One Ummah” di Taman Mini Indonesia Indah (CNN, 2024) dan seminar bertajuk “The Next Level Activism: We Aspire, We Engage, & We Stand for Islam Kaffah” pada Oktober 2024. Metamorfoshow disinyalir sebagai acara yang diselenggarakan oleh eks pengikut HTI yang masih berambisi menyebarkan paham-paham politik ideologisnya. Sosok eks HTI yang tenar seperti Ismail Yusanto menjadi pembicara utama (Metrotvnews, 2024). Mereka mengkampanyekan dan mempropagandakan bahwa nasionalisme merupakan racun dalam Islam yang wajib dimusnahkan. Nasionalisme dianggap memecah belah umat Islam.

Meskipun tidak beririsan dengan JI, HTI tampil sebagai “inang” yang mengawal keberlanjutan kredo dakwah sebelum jihad yang dipromosikan oleh JI. Keduanya tidak terhubung secara komunitas, tetapi berkelindan secara ideologis. Pasca JI runtuh, HTI mulai meremajakan cara penyampaian pesan mereka agar lebih sesuai dengan preferensi dan pola pikir masyarakat modern. Lewat kader-kadernya yang notabene merupakan produk “dakwah” itu, mereka memiliki energi yang

masif untuk mengadakan seminar, webinar, dan event dengan nuansa islamis, gen Z friendly, dan up to date.

Bersama dengan ini, mereka selalu menyisipkan sebuah resep jitu untuk menguatkan barisan, yaitu *islamic brotherhood* atau persaudaraan Islam. Emosi adalah celah yang efektif manusia untuk memanipulasi pemahaman dan indoktrinasi. Kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda dan ISIS sangat meyakini ini sehingga mengintensifikasi pengelolaan emosi untuk menggagal massa dari Barat maupun Asia Tenggara, tak terkecuali JAD, JI, dan radikal teror lainnya di Indonesia (Matesan, 2020).

Dari Sindrom “Katak Rebus” Menuju Swaradikalisasi

Terdapat potret metaforis tentang katak yang dimasukkan ke dalam rebusan air. Ketika katak dimasukkan langsung ke dalam air yang sudah mendidih, dengan refleksi mereka akan langsung lompat untuk menyelamatkan dirinya. Namun, ketika katak dimasukkan ke dalam air biasa kemudian dipanaskan secara perlahan, ia merasa tidak sedang dalam bahaya. Si katak justru berusaha menyesuaikan suhu tubuhnya tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang dalam bahaya hingga akhirnya mati.

Kita mungkin berpikir, katak tersebut mati karena air yang mendidih. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun faktor utama yang menentukan mati atau tidaknya katak tersebut adalah ketidakmampuannya untuk memahami situasi dan menyelamatkan dirinya di waktu yang tepat. Bukannya menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang membahayakan, ia malah menyesuaikan dirinya di lingkungan yang tidak menguntungkan baginya.

Metafora ini relevan diterapkan dalam situasi dinamika dakwah kelompok radikal teroris yang dinamis pasca bubarnya JI. Narasi yang diangkat kemungkinan besar tidak bermuatan kekerasan, perang, bom, bunuh diri, teror, dan semacamnya. Tetapi sekadar memberikan citra

bahwa negara gagal dalam beberapa sektor kehidupan sehingga mengesankan bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi bahkan dirubah. Ini yang dilakukan Abu Rusydan pada tahun 2021 ketika kepergok intel berceramah di salah satu kajian. Ia memang mengatakan bahwa JI sudah tamat. Tetapi ia masih menyuarakan pentingnya hidup di bawah syariat Tuhan. Ini pula yang disuarakan Abu Bakar Ba’asyir pada momen upacara bendera 17 Agustus di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki pada 2021 lalu.

Meski ia sudah ikrar NKRI dan Pancasila, dalam taustiyahnya usai upacara, Ba’asyir tampak tetap berjuang untuk menegakkan syariat Islam di negeri ini. Ia memisahkan antara asas negara dan sistem pemerintahan. Artinya, ia tetap sepakat bahwa Pancasila menjadi landasan filosofis negara, namun sistem pemerintahannya harus diganti, yang diyakini merujuk pada sistem khilafah (islami.co, 2022). Keduanya masih aktif sebagai penceramah dan tokoh agama (eks JI) hingga kini. Meskipun mereka secara resmi sudah membubarkan “rumah besarnya”, menurut Mark Juergensmeyer dalam *Terror in the Mind of God* (2003), gagasan apapun termasuk kekerasan yang dikemas dalam doktrin ideologis sangat susah dilepaskan dari inangnya. Berbeda dengan gagasan kekerasan dengan motif politik maupun ekonomi yang klausulnya jelas.

Militansi dakwah ini dipastikan masih akan terus aktif. Media sosial, kecerdasan buatan, tren budaya digital menjaga asa mereka untuk terus menghadirkan narasi radikal teorrisme. Gen Millennial, Gen Z, dan Gen Alpha sebagai wajah demografi bangsa dimanjakan dengan narasi-narasi heroisme yang seakan mengesankan pemuda sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa dari kebobrokan. Padahal, mereka hanya akan menjadi “katak-katak” yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang terjebak dalam bahaya ideologi radikal terorisme yang mengarah pada ekstremisme kekerasan di dalam panci-panci algoritma media sosial itu. Mereka merasa apa yang disampaikan para tokoh agama radikal teroris mengenai “kegagalan” sistem pemerintahan modern benar adanya sehingga

dibutuhkan transformasi radikal sebagai respon terhadap itu.

Menurut Gen Z, merasa skeptis terhadap negara mungkin dianggap sikap kritis yang perlu dilakukan dalam konteks kebebasan berekspresi. Tetapi menurut kelompok-kelompok radikal teroris seperti eks anggota JI yang belum bertobat, neo HTI, atau JAD, sikap kritis pemuda ini menjadi indikasi bahwa target sudah rentan, dan siap untuk dikelola lebih lanjut secara ideologis. Akhirnya, pemuda-pemuda itu mengalami swa-radikalisasi dan dimanfaatkan sebagai martir untuk memenuhi libido politik ideologis kelompok-kelompok itu. Nalar kritis mereka tergadai dengan janji-janji surgawi yang kosong, akhirnya masa depan mereka mati oleh aktivisme palsu yang sebetulnya tidak patut mereka dapatkan.

Skenario ini mengacu pada ketahanan kelompok radikal terorisme dalam “memperjuangkan” dakwahnya seperti yang terekam dalam lini masa aktivisme gerakan teror di Indonesia. Walakhir, credo “dakwah sebelum jihad” akhirnya diadaptasi oleh semua gerakan radikal teroris, karena pada akhirnya mereka akan menantikan momentum “jihad” itu ketika dakwahnya sudah dirasa tuntas. Dokumen ini adalah langkah antisipasi sebelum “jihad” itu pecah dan menjadi preseden buruk bagi sejarah peradaban bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Meski JI resmi dibubarkan, semangat dakwah dan narasi jihad tetap hidup melalui kelompok-kelompok radikal lainnya seperti neo-HTI dan JAD, yang terus memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstremis. Paradigma “dakwah sebelum jihad” ini berperan dalam menyiapkan generasi muda untuk terlibat dalam agenda ideologis radikal, memanfaatkan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan modern dan mengarah pada swa-radikalisasi, di mana pemuda-pemuda menjadi martir dalam perjuangan yang mengarah pada ekstremisme kekerasan. Perubahan dalam strategi dakwah ini tidak menghapuskan potensi teror. JI tetap mempertahankan prinsip “dakwah sebelum

jihad”, jika sewaktu-waktu konflik pecah di Indonesia, mereka sudah mempunyai pasukan militan yang siap berperang.

Referensi

- Ioana Emy Matesan. 2020. ‘The Rise of the Muslim Brotherhood and the Potential for Violent Escalation’, in *The Violence Pendulum: Tactical Change in Islamist Groups in Egypt and Indonesia*. New York: Oxford Academic.
- Julie Chernov Hwang. 2019. *Dakwah before Jihad: Understanding the Behaviour of Jemaah Islamiyah*. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 41(1), 14-34. <https://muse.jhu.edu/article/722695>
- Mark Juergensmeyer. 2000. *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence*. Berkeley: University of California.
- Quinton Temby. 2010. *Imagining an Islamic State in Indonesia: From Darul Islam to Jemaah Islamiyah*. *Indonesia*, 89, 1-36. <http://www.jstor.org/stable/20798213>
- Sidney Jones. 2011. *Indonesian Terrorism in a Global Context*. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesian-terrorismglobal-context>

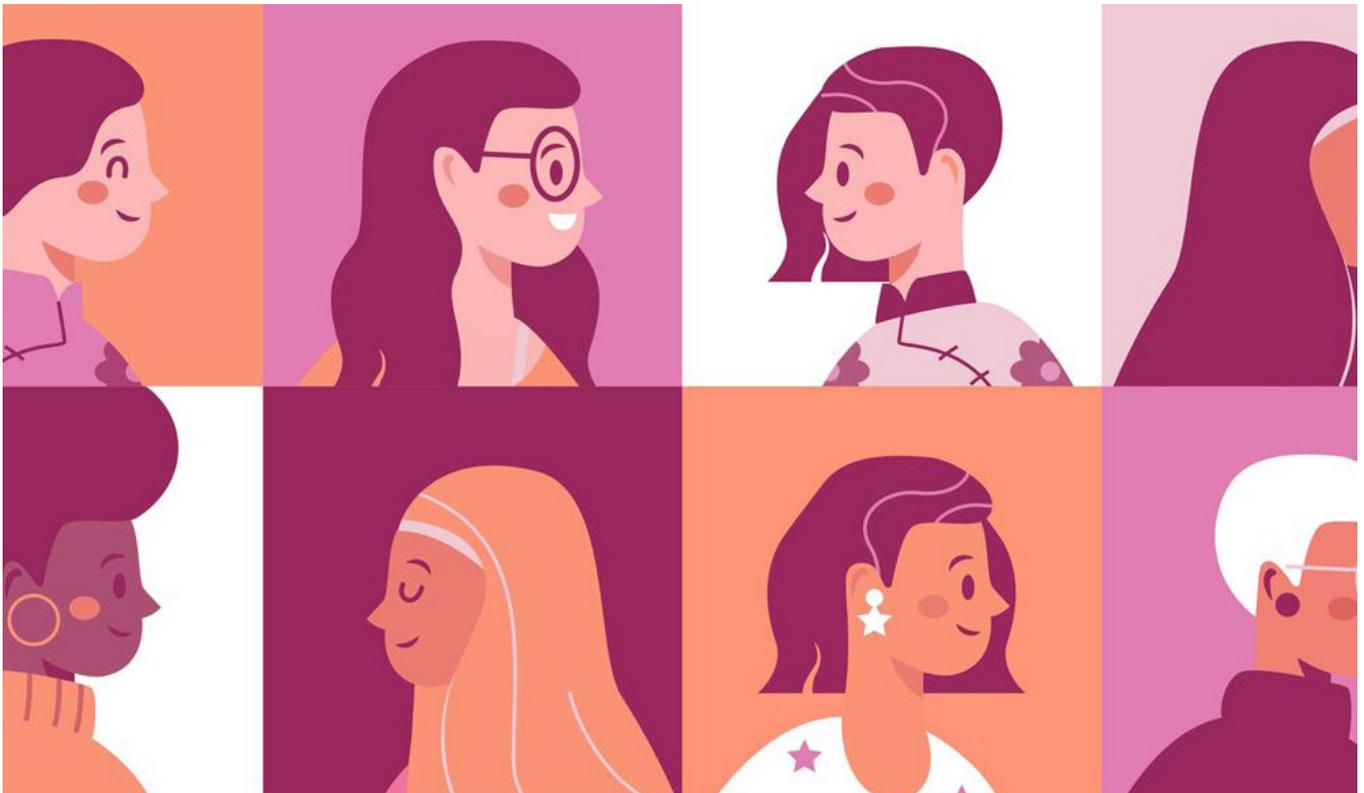
Situs

- <https://islami.co/reuni-akbar-alumni-pondok-ngruki-saya-terenyuh-melihat-ustadzbaasyir-ikut-upacara-bendera/>
- <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCgQZe-eks-jubir-hti-akui-hadir-dalam-acarametamorfoSHOW-di-tmii>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240226125838-12-1067355/polisi-sebutacara-metamorfoSHOW-di-tmii-tak-bawa-atribut-hti>

K A J I A N

PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM REINTEGRASI SOSIAL DAN IDEOLOGIS MANTAN NARAPIDANA TERORISME WANITA DALAM MASYARAKAT

Wasisto Raharjo Jati
Peneliti Pusat Riset Politik - BRIN



Proses reintegrasi terhadap mantan narapidana terorisme (napiter) untuk kembali ke masyarakat senantiasa menghadapi hambatan dan tantangan. Terdapat perdebatan dalam masyarakat untuk menerima atau menolak para mantan napiter ini sebagai anggota baru. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah stigma sosial yang terlanjur melekat ke dalam masyarakat. Sebagai contoh, label seorang penjahat, garis keras, hingga pembunuh senantiasa muncul manakala mantan napiter ingin kembali kehidupan sosial sesuai menjalani masa hukuman penjara. Kondisi inilah yang membuat

mantan napiter ini rentan untuk mengalami radikalisasi ulang (Hoffman, 2017).

Berbagai studi telah menyebut bahwa kegagalan reintegrasi ini yang membuat mantan napiter ini berpotensi mengembangkan sel tidur terorisme (sleeper cells) yang bergerak secara laten dan bisa muncul sewaktu-waktu. Para sel tidur itu utamanya hadir dari mantan napiter yang terpapar berbagai macam konten garis keras sehingga tergerak untuk melakukan tindakan ekstrimis. Mereka bisa bergerak atas nama kelompok atau sendirian (lone wolf)

(Jati, 2021). Oleh karena itulah, reintegrasi yang inklusif menjadi solusi penting untuk menumpas radikalisasi para mantan napiter ini.

Adapun, salah satu faktor yang membuat reintegrasi sosial kurang begitu efektif adalah model pendampingan terhadap para mantan napiter sehingga mereka benar siap berintegrasi sosial ke dalam masyarakat. Pendampingan lebih pada difokuskan kepada perubahan perilaku para mantan napiter yang kemudian diikuti dengan pemberian bantuan sosial ekonomi untuk usaha. Namun hal itu belumlah menjamin secara mutlak bahwa ideologi radikal yang mereka pelajari akan sirna sepenuhnya. Kondisi inilah yang sekiranya membutuhkan adanya pendekatan khusus untuk merubah pola pikir dan ideologis para mantan napiter ini. Terutama soal kesiapan dan daya lenting/resiliensi para mantan napiter ketika kembali dan hidup bermasyarakat.

Hal yang perlu dicatat dari adanya pendekatan khusus tentunya tertuju pada perlakuan para mantan napiter ketika nanti bermasyarakat. Dalam konteks ini konstruksi gender ternyata memainkan peranan penting. Dibandingkan dengan mantan napiter pria yang lebih kecil mendapatkan stigma dan label sosial dari masyarakat, para mantan napiter wanita ini mengalami stigma dan diskriminasi sosial yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan mantan napiter wanita ini menyalahi kodrat karena terorisme itu lebih lekat pada kekerasan yang identik dengan maskulinitas (Farida, 2023). Asumsi ini yang kemudian menjatuhkan mental peluang reintegrasi sosial bagi para mantan napiter wanita untuk berasimilasi sosial.

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, studi ini berupaya untuk merumuskan berbagai pendekatan gender yang bisa diterima oleh para mantan napiter wanita. Pertama, hal yang dilakukan adalah melakukan studi literatur yang menjelaskan dasar ketertarikan wanita ikut dalam terorisme dan apa peran yang mereka jalankan. Kajian literatur ini penting untuk melihat apakah organisasi radikal ini juga menggunakan pendekatan gender dalam

menarik minat wanita untuk bergabung dalam tindakan terorisme. Berbagai hipotesa ini yang kemudian menuntun pada rumusan masalah yakni apa dan bagaimana organisasi terorisme menggunakan strategi gender sehingga bisa menarik minat kaum wanita untuk bergabung dan bertahan dalam tindakan terorisme. Kedua, dari jawaban pertanyaan masalah inilah yang kemudian bisa menuntun pada perumusan pendekatan gender dalam mendukung proses reintegrasi para mantan napiter wanita ini untuk kembali hidup normal bermasyarakat dan bernegara dalam komunitasnya masing-masing.

Kajian Pustaka: Strategi Gender Organisasi Terorisme dalam Menarik Wanita

Praktik dan tindakan terorisme selama ini identik dengan dunia pria sebagai aktor utama. Hal tersebut juga didukung oleh adanya doktrin agama yang lebih dominan mengatasnamakan peranan pria sebagai seorang mujahid maupun imam. Kondisi ini yang membuat peran wanita dalam organisasi terorisme sendiri menjadi perhatian tersendiri di balik alasan dan ketertarikan mereka bergabung.

Berbagai kajian pustaka menyebut alasan pertama strategi gender yang digunakan adalah bahwa agama tidak melihat perbedaan wanita dan pria dalam membela Tuhan (Sjoberg, 2018; Ingram & Campion, 2024). Adanya kesetaraan gender yang kemudian terlahir dari modifikasi tiga konsep wanita dalam Islam sebagai warabatul bait (pengatur rumah tangga), wanita sebagai madrasatul ula (guru bagi anak-anak) dan wanita sebagai tiang negara. Dari ketiga poin penting dari ketiga konsep tersebut, konsepsi wanita sebagai tiang negara ini yang senantiasa digunakan sebagai strategi gender dalam menarik perhatian wanita (Cunningham, 2003). Hal yang ditekankan adalah jihad seorang perempuan adalah lebih sering dipasangkan dengan kata-kata seperti "hati" dan "penghafal" (seseorang yang telah menghafal Al-Quran), "sunnah" (Jalan/perkataan dan tindakan Nabi Muhammad) dan "ajaran". Asosiasi ini menekankan aspek dogmatik dan spiritual,

daripada aspek kekerasan (Biswas & Deylami, 2019). Kondisi ini yang menarik perhatian dan minat wanita bergabung dengan gerakan terorisme karena berjihad bukan tidak selalu dunia laki-laki, namun juga bisa dengan cara alternatif. Dengan demikian terjadilah kesetaraan gender melalui komodifikasi makna jihad. Meskipun pada praktiknya, para perempuan yang sudah bergabung ini kemudian menjadi peran sebagai ibu yang melahirkan pejuang atau yang kemudian dengan konsep ummi ummah (ibu bangsa).

Alasan kedua yang dimunculkan adalah para wanita ini didorong oleh persepsi tentang ketidakadilan keadaan sosial konkret, terutama ketidakmampuan negara untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi. Kondisi tersebut yang kemudian memicu para wanita ini pindah dan bergabung dengan gerakan terorisme karena percaya janji sekolah, pekerjaan, dan infrastruktur yang ditawarkan oleh para ekstremis daring tersebut (Cohen et al., 2014; Nuraniyah, 2018). Hal tersebut pula yang kemudian menciptakan ikatan interpersonal bagi para wanita melalui pernikahan dengan para jihadis pria. Dengan kata lain, konsep gender yang dipakai di sini adalah soal keadilan khususnya sosial-ekonomi yang diinginkan oleh para wanita ini (Johnston et al., 2023). Oleh karena itulah, menyadari kondisi saat ini kurang berpihak pada mereka, para wanita ini kemudian terpapar ajaran garis keras yang kemudian menuntun mereka pada gerakan ekstremisme dan terorisme.

Pembahasan

Mengacu pada pembahasan kajian literatur sebelumnya, maka terdapat dua strategi pengarusutamaan gender yang menonjol yang dilakukan organisasi terorisme yakni kesetaraan dan keadilan. Adapun makna kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan pria dan wanita dalam berjihad dengan cara masing-masing demi membela agama dan masuk surga. Sedangkan keadilan yang dimaksud di sini adalah adanya kesamaan akses dan fasilitas bagi

kaum wanita yang selama ini identik dengan pekerjaan domestik, agar bisa mendapatkan hal sepadan dan serupa seperti yang didapatkan kaum pria.

Berkaca pada dua hal tersebut, maka ada berbagai strategi reintegrasi sosial yang bisa diterapkan kepada para mantan napiter wanita ini. Hal yang pertama tentu adalah pendampingan yang melibatkan mentor yang memiliki pemahaman agama yang moderat dan inklusif. Hal ini bisa diterapkan dengan berbasis sistem liqo yang digunakan dalam sel teroris tersebut. Tentunya hal ini bisa bermitra dengan program moderasi beragama oleh Kementerian Agama maupun pelibatan para ustadzah atau ulama perempuan sebagai murabbi yang bisa ditugaskan dalam membentuk liqo tersebut. Maksud dan tujuannya di sini adalah supaya para mantan napiter itu berada dalam kondisi setara dalam lingkaran kecil terdahulu sebelum kemudian bisa benar dan yakin terjun di masyarakat. Hal yang ditekankan dalam konsep kesetaraan ini tentu adalah merubah paradigma jihad yang orientasinya bukan menuju sistem yang ideal namun lebih pada perbaikan dan mawas diri. Dengan kata lain, jihad yang ditekankan adalah perbaikan diri secara kontinu sehingga bisa setara secara sosial dan kultural sekaligus adaptif dalam situasi sosial yang dinamis.

Hal kedua yang ditekankan sebagai strategi adalah fasilitasi secara sosial dan ekonomi bagi para mantan napiter wanita ini agar bisa bereintegrasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fasilitasi bisa diartikan menyiapkan sarana inkubasi ekonomi bagi para mantan napiter wanita untuk bisa mandiri nantinya. Misalnya saja pelatihan UMKM bagi para mantan napiter wanita yang kemudian ditempatkan pada lingkungan yang terbuka dan toleran. Dalam hal ini, adanya indeks kota toleran Indonesia menjadi salah satu acuan penting tempat fasilitasi dan pelatihan UMKM bagi para mantan napiter wanita tersebut. Harapannya adalah ketika mereka sudah ditempatkan pada kondisi yang terbuka, persepsi keadilan dalam diri muncul bahwa mereka juga harus adil dengan orang lain dan juga dirinya sendiri.

Kesimpulan

Studi ini memperlihatkan bahwa proses reintegrasi mantan napiter wanita jauh lebih kompleks dibandingkan dengan mantan napiter pria. Adanya konstruksi sosial yang kadang melekat membuat reintegrasi para mantan napiter wanita membutuhkan adanya berbagai strategi tersendiri dengan berbasis gender. Dengan mengevaluasi strategi perekrutan teroris wanita oleh para ekstremis, studi ini menggarisbawahi adanya kesetaraan dan keadilan menjadi fondasi penting bagi reintegrasi para mantan napiter wanita tersebut. Hal tersebut perlu didukung dengan fasilitasi kontinu dan melekat baik dari segi spiritual/ideologis maupun sosial/ekonomi. Kedua hal itu penting dalam memastikan proses reintegrasi para mantan napiter wanita ini berjalan sesuai perencanaan.

Referensi

- Biswas, B., & Deylami, S. (2019). Radicalizing female empowerment: Gender, agency, and affective appeals in Islamic State Propaganda. *Small Wars & Insurgencies*, 30(6–7), 1193–1213.
- Cohen, K., Johansson, F., Kaati, L., & Mork, J. C. (2014). Detecting Linguistic Markers for Radical Violence in Social Media. *Terrorism and Political Violence*, 26(1), 246–256. <https://doi.org/10.1080/09546553.2014.849948>
- Cunningham, K. (2003). Cross-Regional Trends in Female Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 26(3), 171–195. <https://doi.org/10.1080/10576100390211419>
- Farida, A. (2023). They are Just the Same; Everyday Life of Terrorists' Families in East Java Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1), 54–79.
- Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism*. Columbia University Press.
- Ingram, K. M., & Campion, K. (2024). Of Heroes and Mothers: Locating Gender in Ideological Narratives of Salafi-Jihadist and Extreme Right Propaganda. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–27. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2024.2322758>
- Jati, W. (2021). From bombing to social media: The role of returning foreign fighters in nurturing terrorism in Asian countries. *Simulacra*, 4(2), 201–213.
- Johnston, M. F., Iqbal, M., & True, J. (2023). The Lure of (Violent) Extremism: Gender Constructs in Online Recruitment and Messaging in Indonesia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 46(4), 470–488. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1759267>
- Nuraniyah, N. (2018). Not Just Brainwashed: Understanding the Radicalization of Indonesian Female Supporters of the Islamic State. *Terrorism and Political Violence*, 30(6), 890–910. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1481269>
- Sjoberg, L. (2018). Jihadi brides and female volunteers: Reading the Islamic State's war to see gender and agency in conflict dynamics. *Conflict Management and Peace Science*, 35(3), 296–311. <https://doi.org/10.1177/0738894217695050>

K A J I A N

PENAFSIRAN EKSTREM PELAKU BOM MASJID

Muhammad Reza Fadil

Dosen tafsir Al-Qur'an IAIN Langsa Mahasiswa Doktoral
Universitas PTIQ Jakarta pada program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI)



Seseorang mungkin bertanya mengapa masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam, juga menjadi sasaran pengrusakan yang dilakukan oleh kelompok teroris padahal juga mengaku Islam. Namun, nyatanya aksi teror bom di masjid ini bukan tanpa dalil, pelaku menjadikan QS. At-Taubah ayat 107 sebagai dasar pembenaran dalam melancarkan aksinya. Ayat ini mengandung kisah mengenai Masjid Dhirar di masa Rasulullah. Masjid Dhirar merupakan masjid yang dibangun oleh kaum munafik guna memecah belah kaum muslimin di Madinah. Kemudharatan pada fungsi masjid ini menjadikan dhirar yang berarti “bahaya” sebagai sebutannya. Pada akhirnya, Rasulullah memerintahkan untuk merobohkan masjid tersebut dengan membakarnya. Peristiwa ini menjadi istinbath hukum di kalangan kelompok teroris untuk melegalkan aksi teror bom di masjid-masjid yang diklaim milik pemerintahan thagut.

Pandangan ekstrim ini dipelopori Syeikh Abu Qatadah Al-Filishtiny, seorang jihadis berdarah Palestina berkebangsaan Yordania yang menjadi salah satu rujukan gerakan-gerakan jihad di dunia termasuk di Indonesia. Pemikirannya terkait aksi bom di masjid ini tertuang dalam risalahnya yang telah diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman ke dalam bahasa Indonesia berjudul “Apakah Masjid Dhirar Itu? Masjid Dhirar dan Hukum Shalat di Dalamnya”. Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman sendiri merupakan seorang terdakwa tindak pidana terorisme yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2018 karena keterlibatannya dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Ia bahkan menyelesaikan terjemahan Fatwa Dhirar tersebut dari balik jeruji besi LP Sukamiskin Bandung di tahun 2007.

Dalam risalah Abu Qatadah dijelaskan bentuk-bentuk Masjid Dhirar di masa kini

dapat berupa; masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah thaghut, masjid-masjid yang dibangun Kedutaan Besar, masjid-masjid yang dibangun oleh jama'ah, partai, atau kelompok tertentu seperti kelompok sufi dan syiah, masjid-masjid pribadi yang dibangun orang-orang kaya untuk membanggakan diri (Al-Filisthiniy, 2012, p. 271).

Sejarah Masjid Dhirar

Kata dhirar yang dinisbahkan kepada masjid ini berasal dari bahasa Arab; dhirar (ضِرَارٌ) yang merupakan isim mashdar dari kata dharra (ضَرَّ) yang dalam bahasa Indonesia berarti “membahayakan” atau “merusakkan”, kata ini juga membentuk kata “kemudharatan”. Penisbatan kata ini kepada sebuah masjid terdapat pada QS. At-Taubah (9) ayat 107.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْضَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, “Kami hanya menghendaki kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, Mujahid, Qotadah dan lainnya bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu 'Amir Al-Rahib dan orang-orang munafik Madinah yang membangun masjid Dhirar.(Al-Suyūthi, n.d.-a; Al-Thabāri, 2000) Ibnu Katsir menerangkan bahwa Abu 'Amir adalah seorang rahib Nasrani di masa Jahiliyah yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan kaum Khazraj. Namun, ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah dan orang-orang memeluk Islam, maka hilanglah kedudukannya di mata kaumnya. Hal ini membuatnya iri dan dengki sehingga menampakkan permusuhan. Maka, ia keluar dari Madinah menuju Makkah untuk menghasut orang-orang kafir Quraish

memerangi Rasulullah hingga tercetuslah perang Uhud.(Ibn Katsîr, 1997) Ia terus berupaya membujuk penduduk Madinah untuk mengikutinya. Namun saat mereka menyadari niat buruknya, mereka berkata “wahai musuh Allah, semoga Allah Azza wa Jalla membuatmu menjadi orang yang selalu dibenci oleh setiap orang yang melihatmu”. Lalu mereka mencela dan mencaci makinya, kemudian ia pun berlalu sambil bergumam, “Demi Allah, keburukan telah menimpa kaumku”. Sebenarnya Rasulullah secara persuasif juga sudah mengajaknya untuk masuk Islam dengan membacakan kepadanya Al-Qur'an, namun ia tetap menolaknya. (Ibn Katsîr, 1997) Bahkan ia berkata kepada Rasulullah, “Aku tidak akan menemui suatu kaum yang memerangimu kecuali aku bersama mereka.(Al-Baghawi, 1997) Maka, Rasulullah pun mendoakannya agar mati di tempat yang jauh dalam keadaan terusir.(Ibn Katsîr, 1997)

Selanjutnya ketika kalah dalam perang Hawazun, ia menemui Heraklius raja Romawi untuk meminta bantuan dalam memerangi kaum muslimin di Madinah.(Al-Jazâiri, 2003) Heraklius memenuhi permintaannya dengan berjanji mengirim pasukan dan mengembalikan kedudukannya sebagai pemuka agama Nasrani yang berafiliasi dengan Romawi jika memperoleh kemenangan. Maka selanjutnya ia pun menghubungi sekutunya di Madinah yakni kaum munafik dan memerintahkan mereka untuk membangun markas sembari menunggu kedatangannya dengan pasukan Romawi. Ia memerintahkan mereka untuk membangun masjid sembari mengumpulkan kekuatan dan persenjataan. Maka merekapun membangun masjid yang lokasinya dekat dengan masjid Quba. Mereka beralih bahwa masjid tersebut dibangun untuk orang-orang lemah di tengah-tengah mereka dan difungsikan saat malam-malam dingin dan hujan. (Ibn Katsîr, 1997)

Setelah masjid itu selesai dibangun, kaum munafik dengan kemunafikannya mengundang Rasulullah untuk mendoakan dan shalat bersama mereka di masjid tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai muslihat agar hal itu menjadi hujjah bagi mereka bahwa Rasulullah merestui

pembangunan masjid tersebut. Namun, saat itu Rasulullah sedang sibuk mempersiapkan perang Tabuk dan berjanji akan ke sana sepulangnya. Namun, saat jalan pulang dan sampai di Dzu Awan yang jaraknya kira-kira setengah hari dari Madinah, turun wahyu QS. At-Taubah (9): 107 di atas yang mengabarkan tipu muslihat mereka dan menyebut masjid tersebut dengan masjid Dhirar, serta melarang Rasulullah untuk shalat di dalamnya pada ayat ke-8. Maka seketika itu juga Rasulullah mengutus dan memerintahkan Malik bin Al-Dukhsyum dan Ma'an bin 'Adi atau 'Amir bin 'Adi untuk membakar masjid tersebut hingga roboh. Sepeninggalnya lokasi masjid Dhirar tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah dan najis oleh nabi dan para sahabat. (Al-Suyūthi, n.d.-b) Sedangkan Abu Amir al-Rahib, sebagaimana doa Rasulullah sebelumnya di atas, ia mati di tempat yang jauh bernama Qansarin, sebuah kota yang berada di wilayah Romawi (Al-Qurthubi, 2003).

Kontra Narasi

Pemaknaan atas masjid Dhirar kepada masjid-masjid masa kini yang disebutkan pada fatwa dhirar di atas mengalami kecacatan dari segi istinbath hukum. Kecacatan itu berada pada tahapan implementasi hukum (tanqih al-

manath) yang mengalami qiyas ma'al fariq. Pada kasus masjid dhirar ini, memang dapat diambil 'illah-nya adalah "masjid yang dibangun dengan tujuan memecah belah umat, makar, atau menimbulkan bahaya (dharar)" dapat dihukumi sebagai masjid dhirar dan hukum asalnya adalah dilarang shalat di dalamnya dan dapat dirobohkan.

Namun, menjadikan masjid Dhirar (di masa nabi) sebagai maqis 'alaih sementara masjid yang dibangun pemerintah dan kedubes negara-negara non-muslim sebagaimana disebutkan di atas sebagai maqis-nya, ini yang menjadi persoalan karena tidak bisa dipersamakan/berbeda (qiyas ma'al farq), atau dengan kata lain tidak "apple to apple". Kekeliruan ini bermula dari persepsi para jhadis yang menganggap suatu negara yang pemerintahannya tidak menjalankan syari'at Islam (versi mereka) maka dinilai sebagai negara atau pemerintahan thagut yang harus diperangi. Hal ini berangkat dari pemaknaan mereka sendiri atas Al-Maidah (5): 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Terjemah Kemenag 2002: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Sehingga peninjauan terhadap pemahaman radikal kelompok teroris ini bermula dari penafsiran terhadap ayat ini. Penafsiran radikal terhadap ayat ini sebenarnya telah dimulai sejak masa khulafaurrasyidin, yakni dipelopori oleh kelompok Khawarij ketika menentang keputusan Khalifah 'Ali bin Abi Tholib yang ber-tahkim dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka menuding dengan menggunakan ayat ini sebagai orang yang tidak menjalankan hukum Allah, kemudian melakukan pemberontakan.

Kesimpulan

Fatwa dhirar ini hanyalah salah satu di antara banyak propaganda mereka yang membawa dalil agama dalam melakukan aksi-aksinya dan perekrutan anggota baru. Mereka piawai dalam meramu dalil-dalil agama untuk melegitimasi aksi-aksi terornya karena para ustadz dan syeikh rujukan mereka merupakan orang-orang yang mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu syariah, namun memiliki kerangka berpikir yang ekstrim sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang radikal. Oleh karenanya, menjadi keharusan bagi ulama maupun para sarjana muslim yang berhaluan moderat untuk menjawab dan melakukan counter untuk mencegah perkembangan gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun dunia dengan mengungkap wacana moderasi beragama.

Referensi

- Al-Baghawi, A. M. al-H. bin M. (1997). *Ma'âlimut Tanzîl*. Dar al-Thayyibah.
- Al-Filisthiny, A. Q. (2012). Apakah Mesjid Dlarar Itu? Mesjid Dlarar dan Hukum Shalat di Dalamnya. In A. Sulaiman (Trans.), *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Al-Jazâiri, A. B. J. (2003). *Aisar al-Tafâsir*. Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. bin F. A.-A. (2003). *Al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân*. Dâr Alam al-Kutub.
- Al-Suyûthi, J. A.-D. (n.d.-a). *al-Dur al-Mantsûr Fî al-Ta'wîl bi al-Ma'tsûr*.
- Al-Suyûthi, J. A.-D. (n.d.-b). *Lubab al-Nuqul Fii Asbab al-Nuzul*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Thabâri, M. bin J. (2000). *Jâmi' al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân*. Muassasah al-Risâlah.
- Ibn Katsîr, A.-H. A. F. I. bin U. (1997). *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm*. Dar al-Thayyibah.



MEMBACA ANATOMI SEMPALAN JI; ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN AKSI AMALIYAH

Desi Ratriyanti

Sejak didirikan pertama kali pada 1993 oleh duo Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar, Jamaah Islamiyah (JI) terus menjalani evolusi. Organisasi ini tidak sepenuhnya solid. Friksi internal membuat JI melahirkan kelompok-kelompok sempalan.

Bahkan, Baasyir sendiri yang merupakan founder utama JI pun akhirnya menyempal dari organisasi yang diinisiasi ya tersebut. Ia membentuk Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Tidak lama setelahnya, Baasyir juga mundur dari MMI, lalu mendirikan Jamaah Ansharut Tauhid alias JAT.

Selain Baasyir, banyak tokoh JI lainnya yang membentuk organisasi sempalan. Misalnya, Aman Abdurrahman yang membentuk Jamaah Ansharud Daulah. Meski menyempal dari JI, namun sejumlah organisasi itu mengusung agenda yang sama; yakni mendirikan kekhilafahan Islam dengan jalan jihad fisik dan menghalalkan teror atau kekerasan.

Kini, selang beberapa saat pasca JI membubarkan diri, kita dikejutkan dengan kemunculan organisasi teroris baru, yakni Daulah Islamiyyah. Konon, Daulah Islamiyyah adalah sempalan JI yang didirikan oleh pihak-pihak yang tidak menerima keputusan senior JI untuk membubarkan organisasi tersebut.

Di titik inilah pentingnya kita membaca kembali anatomi sempalan JI untuk memahami bagaimana organisasi ekstrem ini bermetamorfosa dan bertransformasi. Jika diamati, anatomi sempalan JI ini dapat diklasifikasikan ke dalam setidaknya dua corak.

Dua Corak Sempalan Jamaah Islamiyyah

Pertama, sempalan JI yang berorientasi pada gerakan dakwah kultural dan dakwah tarbiyah dengan mendirikan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh wilayah

Indonesia. Kelompok sempalan JI yang fokus pada gerakan kultural dan tarbiyah ini memang tidak mengorganisasi gerakan teror maupun kekerasan.

Namun, mereka lebih memilih jalur pendidikan agama untuk mentransmisikan paham yang mereka yakini. Pada dasarnya, mereka masih setia memperjuangkan berdirinya negara atau kekhalifahan Islam. Hanya saja, mereka cenderung menghindari cara konfrontatif, lantaran menganggap strategi konfrontasi justru merugikan kepentingan mereka.

Sempalan JI yang berjuang di jalur kultural dan tarbiyah ini umumnya aktif mendirikan lembaga pendidikan keislaman seperti pesantren atau sekolah yang berkarakter paham salafi. Di lembaga tersebut, siswa atau santri diajarkan cara pandang keagamaan yang tekstualistik, anti kebangsaan dan alergi pada kearifan lokal. Tujuannya tentu berinvestasi menciptakan generasi yang mendukung gerakan pendirian daulah atau khilafah islamiyyah.

Kedua, sempalan JI yang tetap setia di jalur gerakan amaliyah, yakni menggunakan jalur kekerasan dan teror untuk mewujudkan agenda mereka mendirikan negara atau imperium Islam. Sempalan ini tetap meyakini bahwa jalan paling efektif memperjuangkan berdirinya negara dan khilafah Islam adalah dengan jihad fisik, merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

Sempalan inilah yang melahirkan sejumlah sel jaringan teroris yang mewujud ke dalam banyak nama. Salah satunya yang belakangan mencuat, yakni Daulah Islamiyyah. Kelompok sempalan Daulah Islamiyyah adalah satu dari sekian gerakan ekstrem yang berorientasi pada aksi amaliyah, seperti penyerangan bersenjata, bom bunuh diri, dan sebagainya.

Kelompok sempalan yang berorientasi pada aksi amaliyah ini akan meneruskan startegi gerakan JI yang konfrontatif, adaptif pada cara kekerasan, dan membangun regenerasi jaringan terorisme secara efektif meski sembunyi-

sembunyi. Seperti manuver Daulah Islamiyyah yang belakangan ini sel-nya ditemukan di banyak kota di Indonesia.

Langkah Preventif Terorisme di Level Hulu

Meski dua corak sempalan JI itu punya startegi, metode, dan karakter yang berbeda, namun pada dasarnya mereka punya tujuan yang sama. Dan, kedua faksi sempalan itu sama berbahayanya. Faksi tarbiyah mungkin tidak tampak efek destruktifnya saat ini.

Namun, jika dibiarkan mereka akan menjadi bom waktu yang mengerikan di masa depan. Sedangkan faksi amaliyah jelas akan menimbulkan dampak kerusakan dalam konteks jangka pendek.

Maka, penanggulangan terorisme memang tidak bisa hanya dibebankan pada aparat keamanan saja. Polisi dengan satuan anti terornya hanya efektif mengatasi persoalan terorisme di level hilir dengan penindakan dan penegakan hukum yang tepat dan terukur. Di level hulu, pemberantasan terorisme membutuhkan sinergi bersama antar seluruh eksponen bangsa.

Penanggulangan terorisme di level hulu ini merupakan tindakan preventif yang idealnya mengedepankan pendekatan kultural. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh dan lembaga keagamaan untuk mengampanyekan paradigma moderasi beragama ke seluruh umat. Terutama kelompok milenial dan gen Z yang menjadi target utama regenerasi gerakan ekstrem.

Di saat yang sama, pemerintah harus tegas pada lembaga pendidikan keagamaan yang terafiliasi gerakan ekstremisme atau setidaknya mengajarkan paham radikal ke murid-muridnya. Lembaga keagamaan yang serba eksklusif dengan kurikulum yang intoleran bahkan radikal adalah mesin yang akan mencetak kader dan calon teroris di masa depan. Diperlukan regulasi khusus agar aparat bisa menindak sempalan organisasi teroris berkedok lembaga pendidikan ini.

N A R A S I

DAULAH ISLAMIYAH: REINKARNASI TERORISME PASCA BUBARNYA JI

Siti Nurul Hidayah



Ketika Jamaah Islamiyah (JI) membubarkan diri, banyak pihak meragukan bahwa itu akan menjadi akhir terorisme di Indonesia. Keraguan itu tervalidasi oleh penangkapan sejumlah teroris di Batu, Sukoharjo, dan Poso dalam beberapa hari terakhir.

Total ada 10 lebih tersangka teroris dibekuk Densus 88 Anti-Terror Polri. Salah satu terduga teroris yang ditangkap di Batu, bahkan sudah bersiap meledakkan dua gereja. Ada banyak fakta mencengangkan dibalik penangkapan tersangka teroris di Batu ini.

Mulai dari ditemukannya bahan peledak kategori high explosive sampai munculnya nama jaringan teroris baru, yakni Daulah Islamiyyah. Dalam peta terorisme di tanah air, nama Daulah Islamiyyah belum pernah terdengar sama sekali.

Pakar kajian terorisme, Ali Chaidar, sebagaimana dikutip CNN Indonesia menyebut bahwa Daulah Islamiyyah adalah gabungan antara pecahan JAD dan JI. Ia menyebut bahwa dua organisasi itu punya faksi sempalan dan

lantas membentuk entitas baru bernama Daulah Islamiyyah.

Reinkarnasi Terorisme Pasca JI

Ali Chaidar menegaskan, Daulah Islamiyyah ini secara spesifik menasar kalangan remaja dan anak muda sebagai target indoktrinasi dan rekrutmen. Alasannya adalah karena anak muda apalagi remaja tergolong masih polos dalam beragama sehingga mudah dicekoki ideologi radikal.

Pernyataan Chaidar ini menjawab kecurigaan sebagian orang tentang bahwa pembubaran JI tidak diikuti oleh anggota di akar rumput. Ketika para senior JI mengubah haluan jihad dari aksi kekerasan ke jalan pendidikan dan sosial, sejumlah simpatisan di akar rumput tampaknya masih setia dengan garis perjuangan lama.

Bukan bermaksud menakut-nakuti, namun ke depan reinkarnasi terorisme seperti Daulah Islamiyyah ini tampaknya akan terus bermunculan. Ibarat rumput, mereka akan terus

tumbuh selama lahan suburnya masih tersedia.

Dalam konteks terorisme, lahan subur itu adalah masyarakat yang beragama secara konservatif, yakni eksklusif dan intoleran. Selama konservatisme beragama masih lenggeng di tengah umat, maka bisa dipastikan radikalisme dan ekstremisme akan terus eksis. Konservatisme beragama adalah embrio bagi lahirnya perilaku kekerasan dan teror.

Ironisnya, pasca Reformasi kita menyaksikan sendiri bagaimana pendulum keberagamaan di kalangan muslim justru mengarah pada sentimen konservatisme. Wajah Islam moderat dan toleran yang menjadi ciri khas Islam Nusantara perlahan luntur. Corak Islam yang tekstualis, kaku, dan anti-perbedaan serta alergi pada kearifan lokal kini menjadi karakter yang mendominasi wajah Islam Indonesia.

Bagaimana Mencegah Radikalisme Kaum Muda?

Di tengah kondisi itulah, paham takfirisme dan bidahisme tumbuh subur. Segala ekspresi keagamaan yang tidak ada legitimasinya dalam teks lantas dengan mudah dicap sebagai bidah bahkan kafir. Labelisasi bidah dan kafir itu lantas menjadi semacam pembenaran atas tindakan teror dan kekerasan yang dilakukan kaum ekstremis.

Kelompok radikal-teroris selalu mengklaim aksi kekerasan yang mereka lakukan sebagai bagian dari menjaga sakralitas dan kemurnian ajaran Islam. Kelindan antara konservatisme dan puritanisme inilah yang membuat gerakan terorisme terus mengalami reinkarnasi. Hari ini mati, besok lahir kembali. Begitu seterusnya.

Apalagi di era digital seperti sekarang, ketika individu bisa terpapar paham radikal melalui media sosial. Inilah yang populer disebut dengan istilah self-radicalization alias swa-radikalisasi. Fenomena swa-radikalisasi terjadi lantaran banyak anak muda mengalami peningkatan girah keagamaan, namun sayangnya tidak dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni tentang agama itu sendiri.

Alhasil, banyak anak muda hari ini belajar agama secara instan melalui kajian-kajian ustad di media sosial. Tanpa memahami bahwa materi kajian itu sebenarnya mengarah pada konservatisme bahkan ekstremisme. Ghiroh beragama tanpa diimbangi dengan literasi keagamaan yang mumpuni adalah celah bagi masuknya ideologi radikal di kalangan anak muda.

Maka, yang wajib kita lakukan sebenarnya adalah mengelola agar ghiroh keberagamaan di kalangan kaum muda itu tidak mengarah pada radikalisme dan ekstremisme. Lantas, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menumbuhkan critical thinking di kalangan generasi Z. Terutama dalam mempelajari agama. Sikap kritis inilah yang akan menghindarkan mereka dari sikap taklid buta terhadap paham atau ajaran tertentu.

Sikap kritis akan mendorong anak muda untuk senantiasa berdialog dan menemukan kebenaran dengan jalan diskursif, bukan dogmatik. Langkah kedua adalah membangun kesadaran di kalangan generasi Z bahwa mempelajari agama tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan bertahap dan bertumpu pada aspek historisitas keilmuan (sanad) yang jelas dan ketat.

Kesadaran akan pentingnya sanad keilmuan ini menjadi penting agar generasi Z yang tengah mengalami euforia belajar agama itu tidak salah memilih guru. Ada pepatah dalam tradisi sufistik yang mengatakan bahwa jika kita salah memilih guru, maka kita bisa terjerumus ke neraka bersama setan. Pepatah itu kiranya wajib dipahami oleh para gen Z yang tengah semangat belajar agama.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua, guru/lembaga pendidikan, para tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk terus menanamkan spirit moderasi beragama di kalangan anak muda. Moderasi beragama adalah benteng terakhir yang akan menyelamatkan generasi bangsa dari infiltrasi paham radikal.

PEMBUBARAN JI: AKHIR PERJALANAN ATAU STRATEGI BARU?

Agus Sulaiman, Noor Irawan, dan Reza Maulana Omar

Deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) oleh 16 tokoh seniornya pada Juni 2024 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah pemberantasan terorisme di Indonesia. Deklarasi tersebut memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari apresiasi terhadap keberhasilan program deradikalisasi hingga skeptisisme yang mempertanyakan keaslian niat di balik pembubaran itu.

Apakah ini benar-benar menandai akhir dari perjalanan salah satu organisasi teroris paling berpengaruh di Indonesia? Atau hanya langkah strategis untuk beradaptasi dengan tekanan hukum dan sosial?

Untuk memperdalam hal tersebut, redaktur Jalan Damai mewawancarai Abu Fida, seorang mantan napiter yang memberikan pandangannya tentang dinamika pembubaran JI, potensi munculnya kelompok baru, dan pentingnya memahami kembali konsep jihad dalam semangat kebinekaan dan NKRI.

Redaktur:

Belakangan ini diberitakan bahwa kelompok Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar. Menurut Anda, apakah pembubaran ini benar-benar nyata, ataukah hanya strategi untuk tetap bergerak di bawah permukaan?

Abu Fida:

Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menilai sesuatu secara zahir, yaitu apa yang tampak secara lahiriah. Soal niat atau apa yang ada di baliknya, itu hanya Allah yang tahu. Allah SWT mengetahui apa yang tersembunyi,

sementara kita hanya bisa menilai apa yang terlihat.

Redaktur:

Mengingat JI merupakan kelompok berpaham takfiri yang menghalalkan kekerasan, apakah mungkin menghilangkan pemahaman radikal seperti ini dari mantan anggotanya?

Abu Fida:

Itu bisa, tapi membutuhkan faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah adanya masyarakat yang mampu memperjuangkan keadilan, sehingga menciptakan lingkungan yang selaras dengan fitrah manusia. Sedangkan faktor internal adalah kesadaran individu. Kesadaran ini bisa tumbuh melalui diskusi dan dialog yang mendalam, sehingga individu menemukan kebenaran, bukan sekadar membenaran.

Redaktur:

Di kasus lain, Siska Nur Azizah, pelaku teror Mako Brimob tahun 2018, secara sukarela berikrar setia kepada NKRI. Menurut Anda, apakah publik dapat percaya pada ikrar semacam ini?

Abu Fida:

Inshaallah, kita perlu berpikir positif. Kita menilai secara zahir, selama tidak ada bukti konkret yang menunjukkan Siska akan kembali pada pemikiran lamanya. Kita serahkan penilaian batiniah ini kepada Allah. Selama bukti otentik tidak ada, kita berprasangka baik terhadap apa yang terlihat.

Redaktur:

Dengan bubarnya JI, apakah ada perubahan pola pergerakan kelompok teror lainnya di Indonesia yang sebelumnya terafiliasi dengan JI?

Abu Fida:

Setiap tindakan pasti ada akibatnya. Pembubaran JI bisa berdampak pada dinamika kelompok lain. Misalnya, data tahun 2023 menunjukkan adanya “zero attack,” tidak ada serangan teror di Indonesia. Ini bisa jadi merupakan implikasi dari pembubaran JI, ikrar setia seperti yang dilakukan Siska, atau faktor lain. Namun, penting untuk diingat, upaya pembubaran JI bukan hal baru—langkah ini sudah dimulai sejak lama, bahkan sejak 2011.

Redaktur:

Perlu dilakukan rekontekstualisasi atau penafsiran ulang terhadap ayat-ayat jihad agar lebih sesuai dengan semangat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?

Abu Fida:

Sangat perlu. Untuk menjaga kebinekaan dan harmoni di Indonesia, ayat-ayat jihad harus dimaknai secara proporsional, sesuai konteksnya. Tafsir ini sebaiknya dikembalikan kepada ulama yang kompeten, yang tidak mempolitisasi makna jihad, tetapi mendudukkannya sesuai porsinya. Ayat-ayat tersebut harus dilihat sebagai bagian dari panduan yang merawat keberagaman dan kebersamaan, bukan sebagai pembenaran untuk kekerasan.

Indonesia adalah rumah besar dengan berbagai keragaman. Sinergi antara umat Islam dan elemen masyarakat lain menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan, demi meraih ridha Allah SWT. Dengan komitmen bersama, Indonesia bisa terus merawat kebinekaannya dan menguatkan pondasi untuk masa depan yang damai.





Jurnal

jalandamai

KAJIAN TERORISME DAN KONTRA NARASI